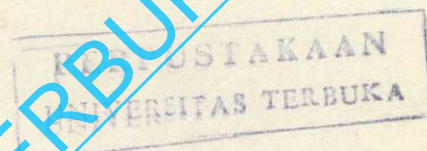




LAPORAN PENELITIAN DAN USULAN PROYEK

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLA DAN ANGGOTA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI
MELALUI SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH



UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh:
Kuswaya Wihardit

KERJASAMA ANTARA
INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 1990

RINGKASAN

NAMA PROYEK : LAPORAN PENELITIAN DAN USULAN PROYEK
 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLA DAN ANGGOTA KOPERASI
 PEGAWAI NEGERI MELALUI SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH
 PENYELENGGARA : Kerjasama antara IKPN-RI dengan UNIVERSITAS TERBUKA
 TEMPAT : JAKARTA

A. Pendahuluan

Usulan proyek ini disusun berdasarkan berbagai masukan yang diperoleh dari pengelola dan anggota koperasi melalui penelitian yang dilaksanakan di 4 daerah sampel yaitu DKI Jakarta, Palembang, Bandung dan Maluku. Penelitian ini berusaha menghimpun berbagai potensi yang dapat mendukung diselenggarakannya Pendidikan Jarak Jauh bagi para pengelola dan anggota koperasi (PJJ koperasi), antara lain potensi geografis, potensi sumber daya manusia, sumber biaya, potensi prasarana, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan (training needs) serta faktor penghambat.

B. Tujuan

Usulan proyek ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang usulan sistem pendidikan yang cocok bagi para pengelola dan anggota koperasi melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh.
2. Memberikan masukan tentang pengetahuan dan ketrampilan yang perlu diberikan melalui PJJ koperasi.
3. Memberikan masukan tentang organisasi pengelolaan PJJ koperasi.
4. Memberikan masukan tentang faktor-faktor pendukung penyelenggaraan PJJ koperasi.
5. Memberikan gambaran tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan PJJ koperasi.

C. Hasil Penelitian

1. Secara geografis Primer KPN terletak di daerah perkotaan sehingga mudah untuk dicapai baik oleh kendaraan umum maupun oleh komunikasi telpon dan pos. Hal ini mendukung bagi penyelenggaraan PJJ koperasi, baik untuk penyelenggaraan tutorial, ujian maupun, pengiriman bahan ajar dan komunikasi lainnya.
2. Tenaga yang tersedia di Primer KPN (termasuk Balatkop) cukup potensial karena pada umumnya mereka adalah pejabat di daerah dan paling rendah berpendidikan sarjana muda. Mereka bersedia

membantu PJJ koperasi baik sebagai pengelola maupun sebagai tutor.

3. Para karyawan koperasi mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti PJJ koperasi, namun mereka terbentur pada biaya. Biaya yang tersedia mengandalkan pada dana pendidikan yang sangat terbatas sekali jumlahnya.
4. Ada kesediaan dari pengurus Primer KPN untuk menyediakan ruangan dan prasarana lain apabila diperlukan oleh PJJ koperasi. Apabila mereka tidak mempunyainya mereka juga menyanggupi untuk mencarinya dengan jalan lain.
5. Faktor penghambat yang diduga mungkin berakibat fatal ialah status karyawan yang tidak jelas karena mereka bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta dan bukan pegawai BUMN. Sehingga apapun pendidikan yang akan ditempuh tidak akan memberikan pengaruh terhadap karir mereka. Hambatan lain ialah dukungan institusi yang kurang kuat karena hubungan yang selama ini ada antara koperasi di atasnya (PKPN, GKPN dan IKPN) dengan Primer KPN adalah hubungan kordinasi dan bukan hubungan kedinasan sehingga koperasi di atasnya seperti IKPN, GKPN atau PKPN tidak mempunyai "power" untuk mengatur Primer KPN.

Hambatan yang berkaitan dengan anggota koperasi ialah bahwa mereka lebih terikat oleh instansi dimana mereka bekerja, tentunya mereka lebih mengikuti peraturan instansinya ketimbang koperasi. Dengan demikian sulit bagi IKPN untuk mengharapakan mereka mengikuti PJJ koperasi.

D. Usulan proyek

1. Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) koperasi

- a. Sistem PJJ koperasi dikembangkan menurut prinsip andragogi. Dalam hal ini peserta didik dikondisi untuk menjadi proactive learner yang menekankan pada self-activity, self-control dan self-motivation. Oleh karena itu, peran institusi adalah menyediakan prasarana, sarana dan sistem yang menunjang bagi proactive learner, serta merangsang reactive-learner menjadi proactive learner melalui PJJ koperasi.

b. PJJ koperasi dibagi menjadi 3 jenjang yaitu :

- Jenjang pemula, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada peserta didik agar mereka dapat menjadi "pelaksana" koperasi yang tangguh, antara lain dapat menjalankan usaha koperasi, membuat laporan, dan menjalankan

manajemen koperasi.

- Jenjang penata, bertujuan selain mampu menjadi pelaksana koperasi juga dapat menata koperasi secara tertib baik tertib administrasi, maupun tertib kerja. Untuk menegakkan "tertib" tersebut dari mereka dituntut mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan kerja.
- Jenjang penggerak, bertujuan memberikan kemampuan pada peserta didik untuk mampu mengembangkan koperasi, antara lain mengembangkan usaha, modal, dan mengembangkan anggota.
- c. Jenjang ini dapat ditempuh perjenjang, dan setiap jenjang memperoleh sertifikat. Tetapi dapat juga ditempuh sekaligus, dan sesudah menyelesaikan ke tiga jenjang ini memperoleh ijazah diploma. Baik yang menempuh perjenjang maupun yang menempuh sekaligus, mereka sama-sama mendapat ijazah diploma 1.

2. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan)

Kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh para pengelola dan anggota koperasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang dapat dituangkan ke dalam kurikulum. Kelompok kemampuan tersebut adalah seperti berikut :

- a. Manajemen
- b. Organisasi
- c. Permodalan
- d. Pembelanjaan
- e. Audit
- f. Teori koperasi
- g. Penjualan
- i. Kasir
- j. Pembukuan
- k. Kearsipan
- l. Pergudangan
- m. Pembelian
- n. Pramuniaga
- o. Pemasaran

3. Modul merupakan bahan ajar pokok yang digunakan dalam program PJJ koperasi, karena dengan sistem modul dapat mengembangkan berbagai ragam type peserta didik misalnya type visual (membaca dan melihat), talkatif (diskusi dan presentasi), silent (menyendiri) dan type auditif, walaupun untuk type auditif ini perlu dibantu dengan bahan non-printed (kaset audio).

4. Pengelolaan PJJ koperasi dapat dikembangkan menjadi 3 alternatif seperti berikut:

- a. UT mengembangkan bahan belajar, dan pengelolaan operasional dan akademik sepenuhnya dilaksanakan oleh IKPN.
- b. UT melaksanakan kegiatan akademik yang meliputi registrasi, pengembangan bahan, kegiatan belajar-mengajar (tutorial, praktikum, ujian) dan sertifikasi. Sedangkan IKPN melaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan non-akademik seperti ketatausahaan dan pembiayaan.
- c. UT mengembangkan sistem, dan IKPN melaksanakan PJJ koperasi baik akademik maupun non-akademik.

Dalam usulan ini dikembangkan untuk alternatif b.

5. Pembiayaan yang diusulkan didasarkan pada pengalaman UT selama ini, terutama sektor bahan belajar, pengelolaan, dan ujian.

6. Program ini perlu diuji cobakan melalui pilot project untuk menguji dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan baik sistem secara keseluruhan maupun komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut. Kriteria yang digunakan untuk memilih daerah Pilot Project ini ditetapkan seperti berikut :

- Dari kondisi geografis daerah itu mudah dijangkau dari pusat (UT) karena selama pilot project berlangsung perlu pemantauan yang intensif.
 - Dari segi komunikasi, daerah pilot project relatif lebih mudah untuk dihubungi baik melalui telpon maupun pos.
 - Daerah tersebut cukup potensial dalam membantu menyebar luaskan program apabila telah selesai dilakukan uji coba.
- Sesuai dengan kriteria tersebut, maka dipilih Jawa Barat sebagai daerah Pilot Project dengan mengambil 3 kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi dan Garut sebagai kabupaten pilot project.

7. Setelah implementasi program PJJ koperasi dilaksanakan secara meluas, perlu diadakan evaluasi program secara kontinu. Pentingnya evaluasi seperti ini antara lain ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana program itu dilaksanakan, hasil dan dampak yang dicapai selama program, serta pengaruhnya terhadap pekerjaan mereka.

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas bagi para pengelola dan anggota koperasi sudah cukup lama dirasakan sejalan dengan pesatnya perkembangan koperasi dewasa ini. Hal ini juga sudah menjadi perhatian IKPN yang dituangkan dalam REPELITA IKPN-RI, menyatakan bahwa salah satu cara yang perlu ditempuh untuk maksud tersebut ialah dengan sistem Pendidikan Jarak Jauh.

Dengan adanya kerja sama antara IKPN-RI dengan Universitas Terbuka dirasa sangat tepat, karena masing-masing mempunyai "kemampuan" yang menunjang terhadap pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi para pengelola dan anggota koperasi ini. IKPN mempunyai wawasan yang luas tentang perkoperasian serta memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai, sedangkan Universitas Terbuka mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan dengan sistem Pendidikan Jarak Jauh. Apabila kedua kemampuan ini dipadukan maka akan menjadi suatu kekuatan yang sangat menunjang bagi pelaksanaan PJJ koperasi.

Usulan Proyek ini disusun berdasarkan berbagai masukan yang diperoleh dari data dan informasi yang dikumpulkan dari pengelola dan anggota koperasi melalui penelitian di 4 daerah sampel yaitu DKI Jakarta, Palembang, Bandung dan Maluku. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai informasi tentang keterampilan dan pengetahuan perkoperasian yang dibutuhkan oleh para pengelola dan anggota koperasi, serta faktor penunjang lainnya yang merupakan bahan masukan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Jarak Jauh.

Usulan proyek ini juga merupakan usaha perwujudan dari maksud tersebut, yang guram awalnya disusun oleh Kuswaya Wihardit. Untuk pemantapannya, tanggapan dan saran diperoleh dari Prof. Mawardi Yunus SE, Prof. Dr. Setijadi, Dr. Aria Djalil dan sebagainya. Disamping itu kami tetap mengharapkan masukan lainnya untuk lebih menyempurnakan usulan proyek ini.

Universitas Terbuka
Ketua Pelaksana,

ARIA DJALIL

DAFTAR GAMBAR

1. Pengembangan bahan dan cara belajar	12
2. Variasi bentuk belajar	13
3. Strategi pengembangan PJJ koperasi	14
4. Kurikulum sebagai inti pengembangan PJJ	16
5. Alur pengumpulan informasi	19
6. Struktur kelembagaan	35
7. Fungsi kelembagaan	38

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

RINGKASAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Prosedur	5
D. Lingkup Pembahasan	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar	8
B. Dasar strategi	13
BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM PENDUKUNG	
A. Analisis Potensi Daerah	20
B. Analisis Sumber Daya Manusia	21
C. Analisis Biaya	23
D. Prasarana	24
E. Faktor Penghambat	25
BAB IV. USULAN TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM Pendidikan Jarak Jauh GAGI Pengelola dan Anggota Koperasi	
A. Pengembangan sistem	29
B. Organisasi	33
C. Kompetensi	40
D. Implementasi	50
E. Proyek Perintisan	55
F. Pembiayaan	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	67
LAMPIRAN	
DAFTAR BACAAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkoperasian di Indonesia akhir-akhir ini berkembang cukup pesat, baik secara kuantitas maupun lingkupnya, berkat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya anggota koperasi untuk mengembangkan dan memasyarakatkan koperasi ke seluruh pelosok tanah air. Ini tentu saja tidak lepas dari perjuangan yang gigih dari pemerintah, para ahli, tokoh masyarakat, serta pengurus koperasi. Selama PELITA III misalnya jumlah koperasi meningkat dari 17.430 (1978) menjadi 23.327 (1982), dan tahun 1987 (REPELITA IV) meningkat menjadi 31.162 buah, jadi terdapat pertumbuhan 6% dalam setahun termasuk KUD. Pada tahun 1988 untuk Primer KPN saja baik di tingkat pusat maupun daerah jumlah seluruh koperasi 9.454 buah walaupun yang menjadi anggota IKPN baru 8.118 buah dengan jumlah anggota seluruhnya sebanyak 1.525.507 yang secara resmi sudah tercatat menjadi anggota.

Perkembangan koperasi seperti ini menuntut adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari insan koperasi itu sendiri, baik itu pengurus, badan pemeriksa, karyawan maupun anggota.

Walaupun koperasi sudah berkembang demikian pesat, ditambah pula dengan usaha pemerintah untuk mendorong terbentuknya berbagai lembaga pendidikan perkoperasian seperti SMEA koperasi, Akademi koperasi dan sebagainya. Namun semua itu dirasakan masih belum memadai, belum seimbang dengan pesatnya perkembangan koperasi pada akhir-akhir ini.

Diduga tenaga dan pengurus koperasi saat ini pada umumnya masih diisi oleh tenaga yang belum memiliki keahlian koperasi secara khusus. IKOPIN misalnya, lebih dipusatkan untuk mempersiapkan para ahli (scientist) dalam bidang koperasi. Sedangkan pembinaan yang dimaksud di

sini lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan tenaga koperasi tingkat menengah ke bawah dalam mengelola organisasi koperasi, menghimpun dan mengerahkan dana untuk modal koperasi, menjalankan usaha serta menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, keahlian yang dituntut dari pengelola dan anggota koperasi dapat dirinci seperti berikut :

- a. Pengurus bertugas sebagai manager yang harus memimpin organisasi dan usaha koperasi, untuk ini pengurus dituntut pengetahuan manajemen koperasi yang lebih mendalam. Hal ini sangat penting karena manajemen koperasi sangat berbeda dengan perusahaan atau lembaga pemerintah. Koperasi lebih menekankan kepada sistem kegotongroyongan, kekeluargaan dan kesukarelaan. Sedangkan perusahaan dan instansi pemerintah lebih menekankan kepada pengelolaan berdasarkan manajemen bisnis dan manajemen kedinasan. Oleh karena itu, dalam mengelola koperasi diperlukan bukan saja pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal, akan tetapi juga pengetahuan ekstra yang bertitik tolak dari sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sedangkan karyawan bertugas sebagai orang yang melaksanakan program koperasi yang sudah ditetapkan bersama.
- b. Badan pemeriksa bertugas untuk memeriksa, dan meneliti tata kehidupan perkoperasian. Untuk ini seorang pemeriksa bukan saja harus menguasai manajemen perkoperasian, akan tetapi juga harus menguasai cara supervisi dan penelitian.
- c. Anggota lebih menitik beratkan terhadap memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Yang perlu diperhatikan ialah keseimbangan antara penggunaan hak dan kewajiban. Kalau terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan hak dan kewajiban, dapat dipastikan akan bertabrakan dengan hak dan kewajiban orang lain.

Saat ini telah ada lembaga yang berperan untuk membina keterampilan tenaga koperasi di tiap propinsi seperti Balatkop dan Puslatpenkop, namun daya jangkauannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu sangat dirasakan tentang perlunya peningkatan kualitas tenaga koperasi melalui sistem pendidikan yang lebih luwes, dan mempunyai daya jangkauan yang lebih luas. Sistem pendidikan seperti ini hendaknya dapat mengenyampingkan kendala dalam hal kesulitan untuk meninggalkan tugas sehari-hari karena terikat oleh pekerjaan di koperasi. Sebagaimana diketahui sebagian besar dari pengurus, dan badan pemeriksa mempunyai pekerjaan pokok lain misalnya sebagai pegawai negeri. Tentunya program pendidikan dengan sistem tatap muka biasa tidak akan sesuai bila memperhitungkan faktor-faktor yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu, Pendidikan Jarak Jauh merupakan pilihan yang tepat. Disamping mereka mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuannya, mereka juga tidak perlu meninggalkan pekerjaannya sehari-hari.

Keuntungan lain dari diselenggarakannya pendidikan jarak jauh bagi pengelola dan anggota koperasi ialah lebih pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua orang baik itu pengelola maupun anggota. Jika seandainya terdapat 5 orang pengurus/karyawan di setiap koperasi, maka dari 9000 koperasi akan terdapat 45 000 pengurus/karyawan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Tentunya hal ini tidak mungkin dilaksanakan dengan sistem tatap muka seperti yang selama ini dilaksanakan.

Hal lain yang menguntungkan ialah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh baik oleh pengelola maupun oleh anggota tidak akan hilang karena pengurusnya dimutasikan, karena dari segi keahlian mereka tidak tergantung lagi pada pengurus. Sebagai contoh, seorang pengurus yang sudah mengikuti PJJ koperasi, suatu ketika ia tidak menjadi pengurus lagi, maka ilmu yang sudah dimilikinya tidak akan hilang, atau "terbawa" pergi oleh pengurus yang pergi tadi. Pengurus yang baru dapat melanjutkan kepemimpinannya serta dapat terus menuntut ilmu melalui PJJ koperasi. Sementara itu anggota pengurus lainnya dan juga karyawan

terus mengikuti PJJ koperasi. Jadi dalam hal ini tidak akan terjadi kesangsian bahwa "percuma menatar pengurus koperasi karena mereka jadi pengurus hanya sementara".

Kerja sama antara IKPN dengan UT yang dilaksanakan saat ini, dinilai sangat tepat untuk meningkatkan kualitas pengurus, badan pemeriksa, karyawan dan anggota koperasi di seluruh Indonesia. UT mempunyai pengalaman yang dapat dipakai membantu IKPN dalam mengembangkan PJJ, sedangkan IKPN mempunyai prasarana dan sarana yang sangat bermanfaat bagi pengembangan PJJ.

B. Tujuan

Sebagaimana digariskan dalam REPELITA V bahwa tujuan yang ingin dicapai lebih ditekankan pada peningkatan kualitas koperasi yang dirumuskan seperti berikut: "Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan sehat, rapat anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedangkan pengurus dan badan pemeriksa dapat berfungsi secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut digariskan langkah-langkah kebijaksanaan. Salah satu dari kebijaksanaan itu ialah Pembinaan Kelembagaan Koperasi. Langkah yang ditempuh untuk mencapai hal tersebut salah satunya yang terdapat pada butir c yaitu menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan keterampilan dan penataran bagi para anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para manager dan karyawan koperasi serta aparat instansi terkait lainnya. Kebijakan lainnya yang ditetapkan ialah "pendidikan jarak jauh harus dipakai sebagai alternatif berdasarkan hasil studi kelayakan..."(REPELITA IKPN-RI, 1989-1993,p.92).

Sesuai dengan kebijaksanaan Repelita V dan Repelita IKPN-RI tersebut maka melalui proposal ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang model/sistem pendidikan yang cocok bagi para pengelola dan anggota koperasi dengan melalui Pendidikan Jarak

Jauh (selanjutnya disebut PJJ koperasi).

2. Memberikan masukan tentang program dan kemampuan yang perlu diberikan melalui Pendidikan jarak jauh.
3. Memberikan masukan tentang organisasi pengelolaan PJJ baik yang berkaitan dengan kegiatan administrasi maupun yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
4. Memberikan masukan tentang faktor-faktor pendukung yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan PJJ koperasi.
5. Memberikan gambaran tentang faktor penghambat dalam penyelenggaraan PJJ bagi pengelola dan anggota koperasi, sehingga sudah dapat diantisipasi cara penanggulangannya sejak awal.

C. Prosedur

Untuk mencapai hasil di atas, maka akan ditempuh langkah-langkah seperti berikut :

1. Menyusun usulan proyek (project proposal) berdasarkan berbagai masukan baik berupa data dan informasi dari lapangan, maupun berbagai peraturan dan kebijakan.
2. Review usulan proyek dengan melibatkan peneliti, pengelola Universitas Terbuka, IKPN dan unsur lainnya yang relevan.
3. Seminar untuk memperkenalkan usulan proyek dengan melibatkan berbagai instansi terkait antara lain IKPN, UT, DEPKOP, BALATKOP, Dekopin dan koperasi.

Seminar ini diarahkan dalam rangka:

- Mengkaji kemungkinan penyelenggaraan program Pendidikan Jarak Jauh koperasi yang meliputi antara lain: pengelolaan, strategi pengembangan, sistem/model yang digunakan, faktor pendukung dan faktor penghambat.
- mengkaji pembiayaan yang akan digunakan dalam membiayai program ini.
- mengkaji tentang komunikasi dan jalinan kerja sama antar instansi.

4. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar

Sebetulnya tahapan ini tidak dilakukan pada saat ini, karena tahap ini baru dapat dilakukan setelah usulan proyek selesai dan disetujui. Salah satu pendekatan yang populer dalam mengembangkan kurikulum adalah yang disebut DACUM (Developing A Curriculum). Pendekatan ini telah dibuktikan efektif dengan biaya yang juga relatif rendah dalam menentukan tugas-tugas (tasks) yang harus dilakukan oleh seorang karyawan atau staf yang dalam hal ini pengurus, badan pemeriksa, karyawan dan anggota koperasi. Pada dasarnya Dacum adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada analisis jabatan.

5. Proyek rintisan (Pilot project)

Tahapan ini juga tidak dilaksanakan pada saat sekarang, karena akan dilaksanakan setelah tersusun kurikulum/CBPP (butir 3). Akan tetapi ini merupakan langkah penting untuk melihat apakah program yang disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi untuk melihat kekuatan dan kelemahan sistem dan program yang dilaksanakan. Untuk proyek perintisan ini akan dilakukan di satu daerah terpilih.

6. Implementasi

Penyelenggaraan program Pendidikan Jarak Jauh dilaksanakan setelah melalui proyek perintisan dan sudah diuji penerapannya.

D. Lingkup Pembahasan

Sebagaimana diuraikan pada bagian prosedur, terdapat beberapa langkah kegiatan sampai pada terselenggaranya program Pendidikan Jarak Jauh, yang antara lain meliputi :

1. penyusunan usulan proyek,
2. review usulan proyek,
3. seminar,
4. pengembangan kurikulum dan bahan ajar,

5. proyek perintisan,
6. implementasi,

Dalam tahap kegiatan sekarang ini, kegiatan yang dilakukan terbatas sampai pada tahap kegiatan 3 yaitu sampai seminar. Melalui kegiatan seminar ini akan dievaluasi secara rinci untuk melihat lebih jauh tentang efisiensi dan efektifitas kemungkinan pelaksanaannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar

"Mastery learning" merupakan konsep yang meletakkan dasar bagi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Teori ini menolak anggapan adanya peserta didik yang bodoh atau pintar, menurut Bloom yang mengemukakan teori ini, peserta didik dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu yang cepat dan yang lambat. Menurut teori mastery learning ini menyatakan bahwa semua apa yang dapat dipelajari oleh orang lain, bisa dipelajari oleh siapapun sebagaimana dikemukakan berikut ini. "What any person in the world can learn, almost all person in the world can learn, if provided with appropriate prior and current condition of learning" (J. Galen Saylor et al, 1981 p.303).

Prinsip mastery learning ini melahirkan berbagai bentuk belajar mandiri (Self-Directed Learning), yang antara lain dilakukan dengan sistem PJJ, seperti belajar melalui modul (Sekolah Pembangunan), Pendidikan Terbuka (UT, SMP Terbuka), dan Pendidikan Tertulis (P3G Tertulis Bandung). Sampai sejauh ini, Self-Directed Learning (SDL) yang diselenggarakan melalui PJJ ini menimbulkan kesan bahwa mahasiswa terisolasi dari berbagai aspek kehidupan kampus, seperti dosen dan bahkan temannya sendiri. Namun sebenarnya PJJ tetap erat kaitannya dengan berbagai orang yang bisa membantu seperti guru, tutor, mentor, kelompok belajar dan sebagainya, bahkan mereka tetap berkomunikasi dengan institusinya dan temannya. Jadi dalam self-directed learning belajar tidak sendirian, mereka ditemani oleh berbagai fasilitas belajar, dan tetap berhubungan dengan pihak lain walaupun tidak sebesar pada lembaga pendidikan konvensional.

Sehubungan dengan itu Malcom Knowles (1975, p.18) menggambarkan tentang SDL yang menekankan pendidikan pada inisiatif individu dalam belajar. Beliau mengemukakan bahwa SDL sebagai "a process in which individuals

take the initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes".

Berdasarkan teori tersebut, nampaknya ada pergeseran nilai filosofi dalam pendidikan dari prinsip "pedagogi" ke prinsip "andragogi". Malcolm Knowles membedakan prinsip pedagogi dengan andragogi ini. Andragogi ialah suatu seni atau ilmu memberi bantuan pada orang dewasa dalam belajar, sedangkan pedagogi seni atau ilmu mengajar terutama mengajar anak-anak.

Perkembangan ini mungkin didasarkan pada perkembangan filsafat pendidikan seperti yang ditokohi oleh Peter dan Hirst yang mengemukakan bahwa belajar tidak lagi tergantung pada mengajar, karena ada atau tidak ada proses mengajar, proses belajar dapat terjadi. "Learning does not imply teaching. This is because learning can take place without teaching" (Cornell Ham, 1987, p.88).

Prinsip belajar dengan self-directed learning menitik beratkan pada aktivitas mahasiswa dalam memacu belajarnya. Menurut prinsip andragogi ada yang disebut learner-directed learning, yaitu prinsip yang menekankan pada mahasiswa sebagai proactive learner (Malcom Knowles, 1983, p.14) yaitu mahasiswa tidak tergantung lagi pada motivasi eksternal seperti rewards, diploma, punishment dan sebagainya, akan tetapi lebih banyak tergantung pada motivasi internal seperti antara lain keinginan untuk maju, ingin memperoleh pengetahuan tertentu, atau ingin meningkatkan keterampilan.

Pendidikan Jarak Jauh, sebagaimana yang dikenal sekarang ini berkembang menjadi berbagai macam bentuknya misalnya sistem terbuka, korespondensi, sistem tertulis dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menurut anggapan orang hal tersebut nampak sama saja. Dalam sistem

terbuka terdapat unsur keterbukaan yaitu siapa saja mempunyai kesempatan yang terbuka untuk mengikuti program pendidikan tersebut, tanpa mengenal usia, status kawin, status bekerja dan sebagainya.

Dalam suatu sistem pendidikan menurut prinsip pedagogi dikenal dengan sistem "learning Contract". Menurut pengalaman beberapa ahli, sistem learning contract ini membantu mahasiswa belajar lebih efisien, mendorong mereka lebih kreatif dalam mengidentifikasi sumber belajar, dan mampu mengembangkan strategi belajarnya sendiri.

Yang dimaksud dengan learning contract tidak terlepas dari kata contract yang artinya "a binding agreement between two or more persons or parties" (Malcolm Knowless, 1983,p.26). Menurut teori ini, dalam prinsip pedagogi secara konvensional terdapat kontrak antara dosen dan mahasiswanya tentang yang berkaitan dengan belajarnya antara lain tugas-tugas yang harus diselesaikan, kegiatan belajar yang diikuti, dan tentang mata kuliah yang diambil. Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh, sistem kontrak tersebut tetap ada namun lebih menekankan pada kontrak antara dirinya sendiri, untuk menjadi mahasiswa mandiri, misalnya bagaimana ia mengatur waktu belajarnya, kapan ia harus menyelesaikan tugasnya, kapan ia harus konsultasi belajar dan sebagainya. Jadi dalam belajar mandiri mahasiswa harus bisa menumbuhkan self-motivation, self-control, dan self-activities. Inilah prinsip yang pada prakteknya banyak membantu keberhasilan mahasiswa.

Sesuai dengan prinsip learning contract dalam PJJ ini, maka peran institusi ialah membantu mahasiswa untuk memenuhi kontraknya, yang antara lain:

1. Mengembangkan bahan belajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, dengan menata baik metodologi pengajaran, substansinya dan sintaksnya.
2. Menyediakan fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa antara lain : perpustakaan (sumber belajar), video dan

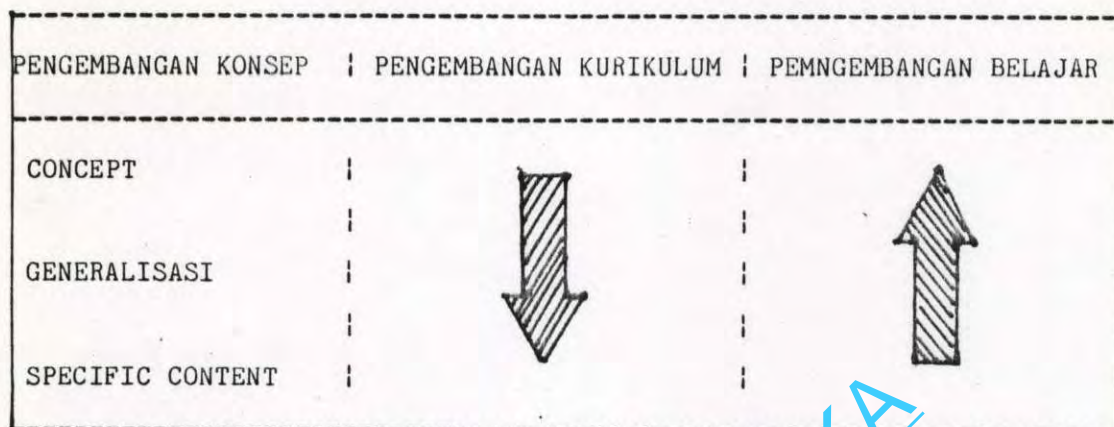
- audio kaset (alat belajar), dan tutor (motivator)
3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, antara lain telpon, pusat informasi, forum komunikasi.
 4. Sebagai fasilitator, institusi juga dapat memberikan mekanisme penunjang antara lain seperti kelompok belajar, kegiatan ekstra kurikuler, dan diskusi ilmiah.

Dalam pengembangan PJJ bagi pengelola dan anggota koperasi diarahkan pada peningkatan pengetahuan praktis dan mental. Hal ini sangat penting karena dalam kedua hal ini para pengelola mengakui masih kurang, walaupun mereka merupakan orang berpengalaman dalam praktek perkoperasian. Namun ini merupakan modal yang dapat dirumuskan dalam program PJJ yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sistem ini dikembangkan dengan bertitik tolak dari pengalaman praktek yang dilandasi dan diperkaya oleh teori, sehingga sistem ini merupakan sistem PJJ yang diarahkan pada pendidikan vokasional.

Oleh karena itu, sistem belajar yang dikembangkan di sini merupakan perpaduan dari pengalaman dan praktek yang terjadi sehari-hari, dengan teori yang ditemukan oleh para ahli. Dengan demikian maka pola belajar yang dikembangkan dapat berupa top down dan bottom up. Top down merupakan pengembangan teori dan program belajar yang dituangkan dalam kurikulum dan CBPP, sedangkan bottom up merupakan pengembangan belajar berdasarkan pengalaman praktis sehari-hari, sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 1:

Pengembangan bahan dan cara belajar

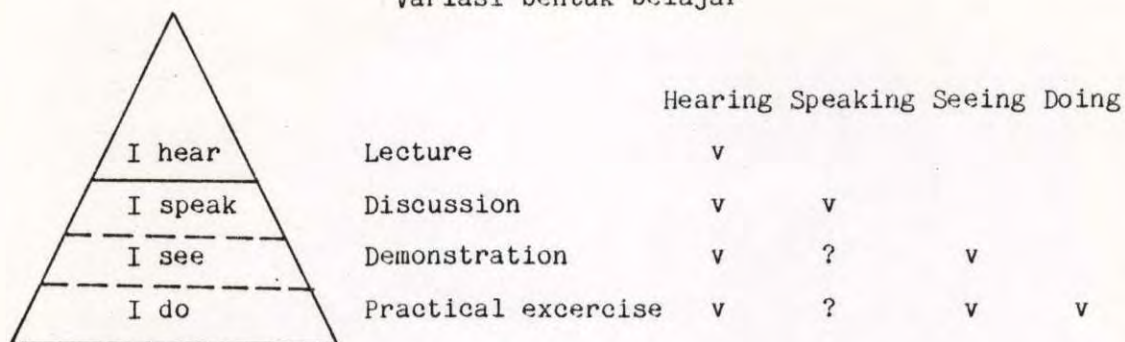


Berdasarkan pengalamannya para pengelola koperasi dapat belajar secara langsung dari praktek yang mereka alami sehari-hari. Mereka dapat belajar tentang praktek-praktek koperasi, mereka dapat menarik kesimpulan atau generalisasi berdasarkan fakta yang mereka lihat dan alami sehari-hari. Pada akhirnya akan sampai pada suatu konsep tentang teori dan landasan koperasi.

Dari pengalaman ini PJJ koperasi berkembang secara deduktif dan induktif, kurikulum dikembangkan secara deduktif dan pengembangan belajar dikembangkan secara induktif. Perpaduan pengembangan sistem belajar seperti ini melahirkan suatu program pendidikan terpakai (applied trainings) yang sangat mendukung kegiatan peserta didik sehari-hari. Perlu diingat bahwa sekalipun sudah ada keterpaduan program dalam sistem PJJ seperti ini, namun program ini juga tetap memperhatikan heteroginitas kemampuan dan latar belakang lingkungan masing-masing.

PJJ koperasi menitik beratkan pada kemandirian belajar, maka untuk mengatasi heteroginitas tersebut dapat dilakukan dengan penyajian berbagai bentuk belajar yang dapat diserap oleh perbedaan kondisi masing-masing. Gambar berikut merupakan variasi cara/bentuk belajar dengan kondisi yang berbeda.

Gambar 2:
Variasi bentuk belajar



*) Edwin K Townsend Coles (1978,p.113)

Menurut pola ini, cara belajar yang menitik beratkan pada mendengar (lecture) cenderung kurang efektif jika dibandingkan dengan kombinasi hearing dan speaking (discussion). Kombinasi dari beberapa cara tersebut cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik jika dibandingkan dengan hanya satu cara saja. Oleh karena itu dalam sistem PJJ harus memperhatikan cara penyampaian seperti tersebut. Namun tidak berarti bahwa "lecture" harus diabaikan sama sekali.

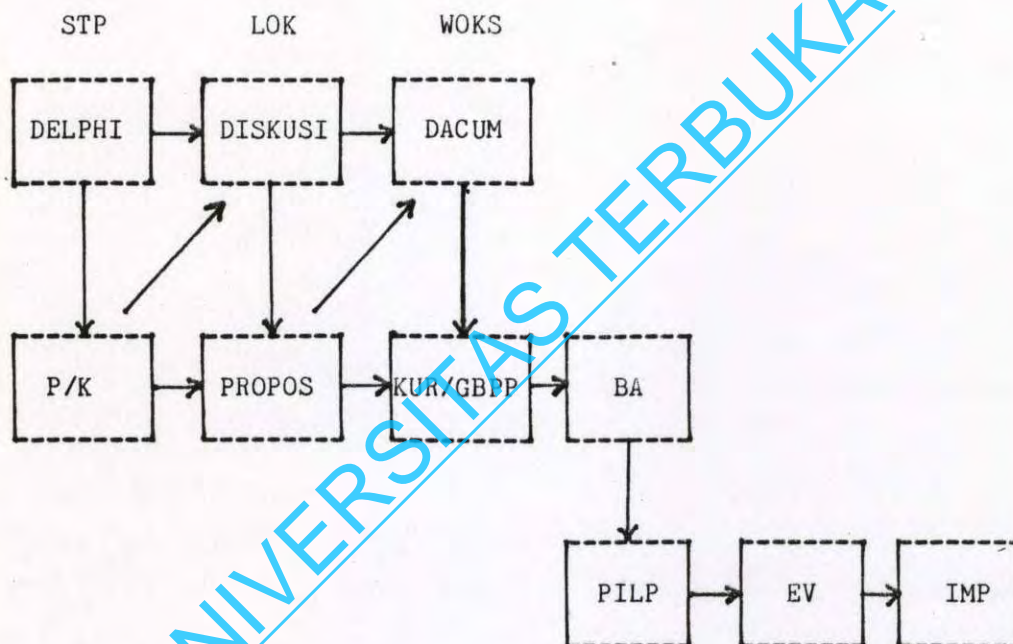
B. Dasar Strategi

Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Jarak Jauh, perlu penataan sistem yang panjang dari mulai studi peninjauan, pengembangan kurikulum dan penetapan bahan belajar, sampai dengan implementasi program di lapangan.

Strategi pengembangan program Pendidikan Jarak Jauh bagi para pengelola dan anggota koperasi diawali dengan studi peninjauan, dengan maksud untuk memperoleh berbagai masukan dan informasi tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh para pengelola dan anggota koperasi, faktor penunjang serta dampak program PJJ bagi kehidupan mereka. Berdasarkan masukan ini disusun suatu proposal yang memuat tentang garis besar dan strategi pengembangan program penyelenggaraan PJJ.

Para ahli kurikulum dan koperasi merupakan orang-orang yang dipilih untuk mengembangkan kurikulum/GBPP, dan para penulis modul merupakan ahli yang dipersiapkan untuk mengembangkan bahan ajar. Dengan strategi seperti ini berkembang suatu organisasi pengembangan PJJ, sehingga akan melahirkan suatu sistem PJJ terpadu.

Gambar 3.
Strategi Pengembangan PJJ-Koperasi



Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dengan teknik DELPHI dapat diketahui sejumlah pengetahuan dan keterampilan (P/K) yang dibutuhkan oleh para pengelola dan anggota koperasi. Pengetahuan dan keterampilan ini merupakan "needs" dan bukannya "wants", yaitu kebutuhan yang benar-benar dirasakan kegunaannya sehari-hari. Jadi tingkat kepentingannya adalah tinggi dalam suatu penyelenggaraan PJJ.

"Needs" ini akan dibawa dalam suatu forum DISKUSI untuk menetapkan jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan beserta faktor penunjang lainnya. Kegunaan diskusi ialah untuk :

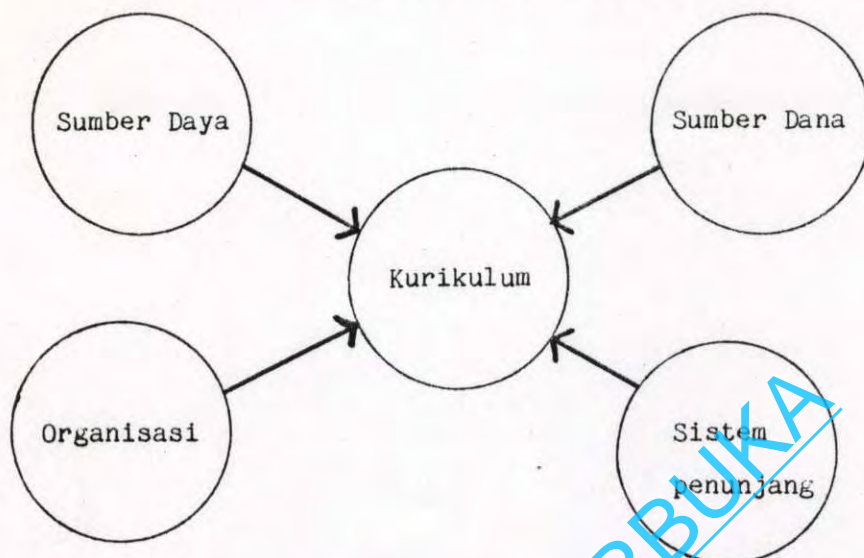
1. Identifikasi pengetahuan/keterampilan yang merupakan kebutuhan,
2. Menetapkan faktor penunjang berdasarkan sumber dan potensi yang ada,
3. Merakit sistem berdasarkan training needs dan sumber/potensi setempat.

Hasil diskusi akan dituangkan melalui proposal (PROPOS) yang pada umumnya merupakan garis besar dari sistem yang dilaksanakan. Dalam hal ini, setiap komponen dari sistem tersebut tidak diletakkan sendiri-sendiri, akan tetapi sudah dirakit kaitannya satu sama lain, sehingga dalam proposal ini dapat diketahui sistem penyelenggaraan PJJ secara keseluruhan, baik itu keterkaitan antar komponen, kaitan antar sistem dengan faktor penunjang, kedudukan sistem dalam konteks sosial yang lebih luas serta dampaknya terhadap sistem perkoperasian. Proposal ini berisi rancangan rinci tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi pengelola dan anggota koperasi.

Langkah lebih jauh ialah kegiatan penyusunan kurikulum dan GBPP dengan menggunakan teknik DACUM. Pada dasarnya melalui teknik Dacum ini memilih dan mengelompokan pengetahuan dan keterampilan menjadi beberapa kelompok kemampuan yang akan dicapai oleh para peserta didik. Dari kegiatan ini akan dihasilkan kurikulum atau GPBB (KUR/GBPP). Dalam GBPP ini pula akan ditetapkan jenjang pendidikan, jenis keahlian dan lama tempuh. Berdasarkan kurikulum/GBPP ini akan dikembangkan bahan ajar (BA) sekaligus dengan bahan ujian, sesuai dengan tahapan dan jenjang pendidikannya.

Setelah tersusunnya kurikulum program Pendidikan Jarak Jauh bagi pengelola dan anggota koperasi, langkah selanjutnya ialah memantapkan sistem, dan kurikulum adalah inti dari keseluruhan sistem, sebagai mana terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4
Kurikulum sebagai inti pengembangan PJJ



Sistem adalah keterpaduan antar beberapa komponen dalam mencapai tujuan tertentu. Sistem seperti ini perlu diuji kemampuannya sebelum diimplementasikan secara lebih luas. Pengujian seperti ini dapat dilakukan melalui project perintisan, karena melalui project ini semua komponen diuji/dievaluasi kemampuannya serta kerja samanya dengan komponen lainnya secara terpadu.

Pilot project (PILP) merupakan tahapan awal sebelum program ini diimplementasikan secara meluas. Oleh karena itu selama tahap ini akan terus menerus dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari seluruh sistem. Kegunaan pilot project ialah:

- a. Menguji apakah sistem yang dikembangkan secara keseluruhan dapat diterapkan pada setting dengan lingkungan tertentu.
- b. Menguji apakah setiap komponen dari sistem tersebut mempunyai kekuatan yang saling menunjang.
- c. Untuk mengetahui secara dini apabila ada komponen yang lemah untuk segera diatasi.
- d. Untuk menguji apakah sistem yang dikembangkan sesuai dengan sistem penunjang yang ada.

Dengan demikian maka untuk mengIMPLEMENTASikan program PJJ secara luas, kita sudah memiliki bekal dan pengalaman dalam penyelenggaraan PJJ melalui Pilot Project.

UNIVERSITAS TERBUKA

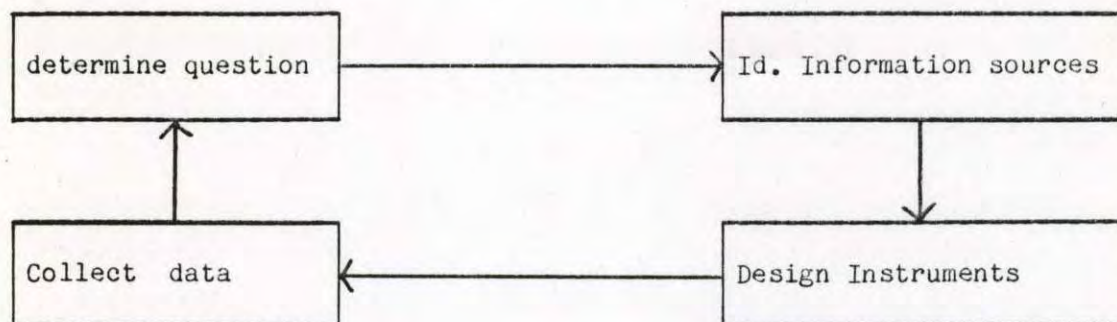
BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM PENDUKUNG

Untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan jarak jauh, data dan informasi serta faktor pendukung lainnya mutlak diperlukan. Hal ini sangat penting untuk menyusun suatu rancangan dan meletakkan dasar bagi proyeksi langkah-langkah kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh daerah, serta faktor penghambat yang mungkin ada untuk segera diantisipasi cara penanggulangannya. Dengan demikian program yang dikembangkan harus secara teknis feasible, secara ekonomi profitable, dan secara sosial acceptable.

Prosedur pengumpulan data dan informasi yang ditempuh dalam studi penjajagan diawali dengan ditetapkannya beberapa pertanyaan awal (initial questions), untuk meletakkan arah informasi tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan meletakkan pertanyaan seperti ini akan dapat diidentifikasi sumber-sumber informasi yang sekiranya dapat memberikan informasi yang akurat. Hal ini sangat penting untuk mendesain instrumen sebagai alat pengumpul data yang valid dan reliable, sehingga data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, untuk kemudian ditetapkan alat pengumpul data yang paling tepat. Dalam studi penjajagan ini pedoman wawancara dan kuesioner dianggap sebagai alat yang paling tepat untuk pengumpul data. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan ini akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memberikan arah terhadap penafsiran dan kesimpulan serta bagi penelitian selanjutnya apabila diperlukan.

Gambar 5:
Alur pengumpulan informasi



Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam rangka memberikan masukan serta memberikan gambaran tentang kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh koperasi, tentang kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan para pengelola dan anggota, sehingga program yang dikembangkan dapat lebih efektif dan efisien. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dapat dilihat dari beberapa standar/kriteria antara lain :

a. Utility

Utility menghendaki peneliti untuk mengakrabkan diri dengan para sumber informasi, mengetahui dengan pasti kemauan mereka, memperoleh informasi yang relevan, serta melaporkannya secara jelas dan tepat waktu.

b. Feasibility

Feasible dalam pengertian bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dapat diterapkan dalam berbagai setting dan situasi, dan dapat memanfaatkan valuable resources yang ada. Standar ini menghendaki bahwa suatu perencanaan adalah "operable" di dalam suatu setting yang dinamis yaitu dapat diterapkan dalam segala situasi.

c. Propriety

Standar ini mencerminkan kenyataan bahwa suatu penelitian mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Dalam hal ini hak seseorang

yang tercakup dalam studi ini adalah dilindungi. Dengan kata lain suatu studi seperti ini harus dilaksanakan secara legal, etis dan tentunya akan menyangkut kepentingan dan kesejahteraan orang banyak.

d. Accuracy

Informasi yang dikumpulkan secara teknis memadai, dan kesimpulan yang diambil logis. Ini akan menyajikan perkiraan yang mantap tentang kebutuhan dan kemampuan yang perlu ditingkatkan. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan dapat diidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan potensi daerah yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program Pendidikan Jarak Jauh. Berdasarkan sistem pengumpulan informasi seperti itulah maka potensi yang ada di daerah dapat dianalisis secara tepat dalam rangka menunjang PJJ koperasi.

Potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang PJJ koperasi ialah:

A. Analisis potensi daerah

Berdasarkan pengamatan dan informasi, ternyata daerah menyimpan suatu potensi yang sangat mendukung bagi dilaksanakannya program PJJ koperasi. Yang dimaksud dengan potensi daerah disini ialah "kemampuan daerah yang secara geografis memiliki berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan program pendidikan jarak jauh, antara lain meliputi komunikasi, transportasi, keadaan alam, prasarana dan sarana dan sebagainya".

Berdasarkan pengamatan dan berbagai informasi yang dikumpulkan, ternyata semua koperasi (Primer KPN, PKPN dan GKPN) dapat digambarkan seperti berikut:

- a. Terletak pada daerah yang cukup strategis, artinya mudah dicapai oleh kendaraan karena pada umumnya lokasinya terletak di kota propinsi, kota kabupaten atau kota kecamatan.
- b. Hampir semua Primer KPN yang ada di kota propinsi dan kabupaten memiliki pesawat telpon, sedangkan Primer KPN yang berada di tingkat

kecamatan dan tidak memiliki pesawat telepon dapat memanfaatkan fasilitas telepon.

dari instansi lain, sehingga mudah dihubungi setiap saat.

- c. Oleh karena koperasi ini menyebar sampai ke tingkat kota kecamatan, maka dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan belajar kelompok, atau sebagai sanggar belajar.
- d. Pada umumnya koperasi memiliki paling tidak satu ruang rapat, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PJJ koperasi. Sehingga kelompok belajar, tutorial dan berbagai pertemuan mahasiswa dapat menggunakan fasilitas tersebut. Dengan demikian hampir semua daerah sampai tingkat kecamatan mempunyai prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung PJJ koperasi.
- e. Disamping itu koperasi itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium praktek. Sedangkan sarana belajar lainnya misalnya perpustakaan sangat sulit ditemukan di koperasi.

B. Analisis sumber daya manusia

Tenaga pengurus koperasi sebagian besar tenaga sarjana atau tenaga intelektual yang tersimpan di daerah. Mereka cukup berpengalaman dalam bidang perkoperasian sekalipun mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan koperasi secara khusus. Dari koperasi yang dikunjungi hampir semua pengurus koperasi sudah pernah mengikuti penataran perkoperasian, baik dalam tingkat lokal, propinsi ataupun tingkat nasional. Namun di luar Jawa yaitu Palembang dan Maluku baru sebagian kecil saja pengurus yang sudah memperoleh penataran.

Sebagian besar pengurus koperasi merupakan tenaga yang diperbantukan dan masih aktif di berbagai instansi pemerintah, dan sebagian diantaranya adalah pensiunan terutama di koperasi-koperasi yang berada ditingkat kabupaten. Pengurus koperasi kadang-kadang merangkap menjadi pengurus di beberapa koperasi. Dengan keadaan seperti ini nampaknya agak sulit untuk kaderisasi tenaga pengurus karena terhambat oleh pengurus rangkap jabatan.

Karyawan koperasi sangat bervariasi dari mulai 1 orang sampai dengan lebih dari 5 orang. Pada umumnya Primer KPN memiliki karyawan sedikit bahkan terdapat koperasi yang tidak mempunyai karyawan, jika dibandingkan dengan PKPN dan GKPN. Koperasi yang tidak mempunyai karyawan menjalankan aktivitas koperasinya ditangani sepenuhnya oleh pengurus.

Walaupun para pengelola ini bukan lulusan dari sistem pendidikan jarak jauh, namun mereka yakin dapat mengikuti PJJ koperasi dengan baik. Namun aspek lain yaitu ijazah yang dimiliki sangat beragam yang terdiri dari ijazah SD, SMP dan SMA, diduga ini akan sedikit menyulitkan program.

a. Ketenagaan

Tenaga yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung program pendidikan jarak jauh, cukup tersedia di koperasi.

- 1) Rata-rata 2-3 orang setiap koperasi di (Jawa Barat) bersedia menjadi pendukung PJJ baik untuk membantu mengelola maupun sebagai tenaga tutor. Begitu pula halnya dengan koperasi di daerah Maluku dan Palembang, walaupun potensinya tidak sebesar di Jawa Barat.
- 2) Agak sulit untuk memperoleh tenaga penulis bahan ajar, karena sebagian besar dari mereka tidak biasa menulis. Untuk penulis bahan ajar tetap mengandalkan tenaga perguruan tinggi atau para ahli yang sudah biasa melakukannya.
- 3) Dari informasi yang dikumpulkan di Jawa Barat terdapat tenaga ahli penyusun kurikulum koperasi di Dikmenjur Kanwil Dikbud, penulis bahan ajar di PKPN Sukabumi, dan kurang lebih 7 orang tenaga pelatih yang sudah cukup berpengalaman dalam perkoperasian dan bersedia mendukung PJJ koperasi yaitu di Balatkop Kanwil Departemen Koperasi. Informasi yang sama juga diperoleh dari Palembang dan Maluku, dengan variasi yang berbeda.
- 4) Hampir semua pengurus koperasi bersedia mendukung pelaksanaan PJJ koperasi dengan berbagai cara, antara lain misalnya dapat mencari

ruangan, dan dapat membantu mengarahkan peserta didik.

- 5) Pada umumnya karyawan koperasi hanya sebagian kecil saja yang sudah mengikuti penataran perkoperasian (20%), karena terbatasnya penyelenggaraan penataran tersebut. Pada umumnya mereka menyambut rencana penyelenggaraan PJJ koperasi, namun mereka mengharapkan bahwa pendidikan tersebut mempunyai civil effect bagi kemajuan diri mereka. Menurut pendapat mereka yang sudah mengikuti penataran, kalau hanya berupa penataran saja mereka sudah bosan, menurutnya pendidikan setingkat diploma adalah yang paling diharapkan.
- 6) Jika seandainya terdapat 4 orang pengelola dari setiap koperasi yang mengikuti PJJ koperasi, maka dari 9 ribu koperasi di seluruh Indonesia (minimal) akan terdapat 36 ribu mahasiswa PJJ koperasi. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perkoperasian di Indonesia. Dan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh pendidikan tatap muka.

C. Analisis biaya

Sebagaimana umumnya dalam suatu pendidikan, dalam PJJ koperasi juga diperlukan biaya. Namun yang dimaksudkan dengan biaya disini ialah kemungkinan biaya yang bisa dikeluarkan oleh setiap individu dalam mengikuti PJJ, baik biaya langsung yang dikeluarkan untuk kepentingan dan kegiatan belajar, maupun untuk kegiatan yang tidak langsung seperti ongkos transport, jajan dan sebagainya. Hal ini perlu diperhitungkan sejak awal karena merupakan faktor yang sangat menentukan kelangsungan pendidikannya.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, penghasilan karyawan koperasi relatif rendah yaitu bergeser antara 30 - 80 ribu rupiah, bahkan ada pengurus mendapat honor hanya 5 ribu rupiah per bulan. Hal ini tidak memungkinkan bagi mereka bisa membiayai pendidikannya dari penghasilannya sendiri. Setelah hal ini dikomunikasikan dengan para pengurus, yang paling mungkin ialah menggunakan "dana pendidikan" yang tersedia di koperasi.

Cara lain misalnya memberikan kredit dan pinjaman uang kepada karyawan yang ingin mengikuti pendidikan adalah hal yang tidak mungkin, karena dananya sangat terbatas. Disamping itu sekalipun terdapat dana pinjaman adalah tidak mungkin untuk meminjamkannya kepada individu, karena income mereka yang terlalu rendah, dan diragukan dapat membayarnya.

Dari pengalaman mengikuti penataran perkoperasian, diperoleh keterangan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali penataran antara 20 ribu sampai dengan 50 ribu rupiah, yang dibayar dari koperasi. Maka untuk pendidikan selanjutnya, mereka juga menghendaki ada bantuan biaya.

D. Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan jarak jauh, prasarana sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Namun demikian tentunya tidak dapat mengandalkan hal tersebut kepada koperasi. Dinas atau instansi dimana koperasi itu berada merupakan harapan yang bisa diandalkan dapat membantu menyediakan sarana/prasarana yang dibutuhkan.

Dari informasi yang dikumpulkan beberapa instansi dimana koperasi itu ada menyatakan kesediaannya untuk membantu, walaupun ada instansi yang tidak mau membantu sama sekali, dengan alasan urusan koperasi berbeda dengan urusan dinas, jadi fasilitas dinas tidak dapat digunakan untuk kepentingan koperasi.

Sebagian besar koperasi mendapatkan dukungan penuh dari kantor dinasnyanya. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar pengurus koperasi adalah tokoh atau para pimpinan pada instansi tersebut. Dengan demikian beberapa prasarana milik instansi tersebut dapat digunakan oleh koperasi, karena pada dasarnya kesejahteraan karyawan koperasi pegawai negeri adalah tanggung jawab kantor dinasnyanya. Dalam menyelenggarakan PJJ koperasi, fasilitas yang dapat digunakan antara lain ruangan rapat, komputer, dan perpustakaan serta sarana lain misalnya OHP. Apabila ada hal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan

PJJ koperasi, kantor instansi setempat dapat membantu mengusahakannya.

Balatkop sebagai instansi dibawah Departemen Koperasi juga memberikan dukungan yang besar untuk diselenggarakannya PJJ koperasi. Disana sudah tersedia prasarana berupa ruang tutorial, ruang pengelola, dan ruang ujian yang bisa digunakan oleh PJJ koperasi. Disamping itu sarana lainnya juga bisa digunakan seperti OHP, proyektor film dan alat belajar lainnya.

E. Faktor penghambat

Disamping beberapa faktor pendukung seperti diuraikan diatas, terdapat pula faktor penghambat yang apabila tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin bisa berakibat fatal. Faktor tersebut ialah berkaitan dengan status karyawan koperasi.

1. Sebagaimana diketahui bahwa status karyawan koperasi adalah tidak jelas karena mereka bukan pegawai negeri, bukan pegawai BUMN dan juga tidak termasuk pegawai swasta. Dengan status seperti ini menyebabkan mereka merasa waswas dan ragu. Pada umumnya mereka bekerja berdasarkan pengabdian dan kesukarelaan yang tinggi, apabila sikap suci ini luntur maka bekerja di koperasi hanya merupakan batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan lain.

Akibat lain dari status seperti ini, apa yang mereka harapkan apabila mereka sudah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perkoperasian. Hal ini disebabkan karena tidak ada sipil efeknya sama sekali terhadap karir mereka, baik itu terhadap kepangkatan, gaji atau karir lainnya.

Hambatan lain yang mungkin terjadi ialah bahwa anggota koperasi Primer KPN ialah pegawai negeri pada instansi pemerintah. Jadi keterikatannya dengan koperasi sangat kurang, kecuali kalau ada kebutuhan uang atau barang yang dapat dipinjam dari koperasi. Dengan

demikian koperasi tidak mempunyai "kekuatan" untuk menganjurkan anggotanya mengikuti PJJ koperasi.

Hal ini berbeda dengan para pengurus yang pada umumnya adalah pegawai negeri. Pendidikan koperasi yang mereka peroleh sangat

mempengaruhi karirnya di koperasi misalnya dapat menjadi pengurus di tingkat koperasi yang lebih tinggi, atau dapat menjadi badan

pemeriksa, atau merangkap jabatan di koperasi lainnya. Dengan kata lain, apabila pengurus telah menyelesaikan pendidikannya, karir mereka jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan karyawan biasa.

2. Hambatan lainnya ialah dukungan institusional, ini tidak diartikan bahwa sama sekali tidak ada dukungan dari instansi tertinggi namun hubungan hierarhi antara pusat dengan daerah hanya dilandasi oleh hubungan kerjasama dan bukan hubungan otonomi kedinasan. Hal ini akan menyulitkan terbukti masih banyaknya Primer KPN yang belum masuk anggota IKPN, GKPN atau PKPN. Tentunya hal ini akan menimbulkan hambatan karena di Indonesia ini adanya kebiasaan kurang baik yaitu "baru mau" kalau ada perintah dari atasan, tanpa perintah atasan mereka tidak akan mempedulikannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut maka perlu ditempuh beberapa cara, antara lain ialah :

- a. Menjalin kerja sama secara insitusional antara IKPN dengan Departemen koperasi agar mempunyai kekuatan institusional bagi kelangsungan PJJ.
- b. Menyelenggarakan pendidikan setingkat diploma 1, karena dengan ijazah ini akan terdapat sipil efek terhadap karyawan koperasi, sehingga PJJ koperasi menjadi daya tarik tersendiri.

F. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan

Perlu diketahui bahwa karyawan koperasi mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat beragam, dari mulai tingkat SD sampai dengan sarjana. Namun sedikit sekali yang memiliki pendidikan khusus perkoperasian. Oleh karena itu perlu adanya persyaratan khusus bagi karyawan yang ingin mengikuti pendidikan koperasi melalui sistem pendidikan jarak jauh, misalnya pendidikan tahap ini hanya bagi yang berijazah SMA keatas. Atau perlu adanya penjejangan pendidikan misalnya untuk tingkat lulusan SMP, SMA atau tingkat universitas.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pengelola dan karyawan koperasi dapat disusun menjadi beberapa jenis, yaitu :

- 1) kebutuhan yang bersifat pengetahuan terutama tentang teori dan landasan koperasi.
- 2) keterampilan praktis yang bisa dipraktekan dalam kegiatan sehari-hari.
- 3) Yang berkaitan dengan sikap mental dan kesadaran koperasi.

Dapat disimpulkan bahwa baik pengurus maupun karyawan mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan kemampuannya, namun pendidikan ini tidak sebagai program yang hanya lewat begitu saja, tetapi mempunyai pengaruh baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepentingan koperasi.

BAB IV
USULAN PROYEK
Tentang
PEMGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
BAGI PARA PENGELOLA DAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI NEGERI

Program Pendidikan Jarak Jauh koperasi yang diusulkan merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan juga tidak bisa lepas dan harus bertitik tolak dari sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional dikembangkan berlandaskan dan untuk kepentingan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka program pendidikan jarak jauh bagi pengelola dan anggota koperasi (PJJ koperasi) juga dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat koperasi itu sendiri.

Sebagaimana sudah disinggung dalam bagian Landasan Teori, pengembangan pendidikan dengan sistem Pendidikan Jarak Jauh, menitik beratkan pada prinsip "andragogi". Oleh karena itu kebutuhan akan pendidikan perkoperasian merupakan landasan yang paling kokoh dalam meletakkan prinsip belajar mandiri menurut prinsip andragogi. Adalah suatu kenyataan dari berbagai penelitian dan pengalaman (Malcolm Knowles, 1989) bahwa orang yang mempunyai inisiatif sendiri dalam belajar (proactive learner) dapat belajar lebih banyak, serta lebih baik jika dibandingkan dengan peserta didik yang tergantung pada guru, dan pasif menunggu diajarkan oleh guru (reactive learner). Oleh karena itu sesuai dengan teori Bloom, peran institusi ialah berusaha menyajikan dan mempersiapkan kondisi belajar yang mendukung proactive learner, dan merangsang reactive learner berangsur-angsur menjadi proactive learner. Yang dimaksud dengan kondisi disini ialah sistem dan lingkungan belajar yang ditunjang oleh berbagai fasilitas.

Berikut ini adalah langkah-langkah strategi yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan PJJ koperasi.

A. Pengembangan sistem

Dalam rangka usulan penyelenggaraan PJJ koperasi sistem dikembangkan sebagai suatu sistem pendidikan yang menitik beratkan kepada kemandirian belajar. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya begitu menentukan sehingga apabila salah satu komponen tersebut tidak jalan maka akan ambruklah keseluruhan sistem tersebut.

Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh bagi pengelola dan anggota koperasi ini mencakup beberapa komponen, antara lain :

1. Kurikulum dan GBPP
2. Kegiatan proses belajar/mengajar
3. Bahan belajar
4. Evaluasi belajar
5. Sarana belajar

Komponen tersebut di atas merupakan komponen inti dari sistem belajarnya (micro-system), komponen lain sebagai komponen penunjang tidak dibahas secara khusus dalam bagian ini misalnya komponen prasarana, pelayanan mahasiswa dan aspek sosial mahasiswa. Hal ini untuk lebih menitik beratkan pada komponen belajar mandiri sebagai inti dari keseluruhan sistem (macro-system).

1. Kurikulum

Secara sederhana kurikulum ialah sekumpulan mata ajaran yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa dalam kurun waktu tertentu. Diharapkan bahwa apabila mahasiswa sudah menyelesaikan pendidikannya akan diperoleh keahlian tertentu pula. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum PJJ koperasi antara lain :

a. Tujuan kurikuler

Tujuan kurikuler perlu dirumuskan untuk memberikan arah bagi pendidikan yang dilaksanakan, karena semua tujuan (TIU dan TIK) akan

bertitik tolak dari tujuan kurikuler ini. Tujuan kurikuler ini merupakan keinginan yang dikomunikasikan kepada mahasiswa dengan cara membuat suatu pernyataan yang berisi perubahan tingkah laku mahasiswa yang diharapkan, setelah mereka menyelesaikan seluruh kegiatan kurikulum.

b. Mata kuliah

Untuk mengisi kurikulum tersebut perlu dikembangkan sejumlah mata kuliah yang akan diberikan selama mengikuti PJJ koperasi ini, sesuai dengan jenjang pendidikan yang diprogramkan. Untuk ini perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) Mata kuliah prerekuisit harus ditempatkan pada bagian awal, misalnya Pengantar Akuntansi mesti diberikan lebih dulu sebelum Akuntansi I.
- 2) Mata kuliah yang bersifat umum mesti diberikan lebih dahulu sebelum mata kuliah yang lebih khusus, misalnya Landasan koperasi, dan teori koperasi.

c. MKDU

Apabila PJJ koperasi ini diprogramkan untuk program non gelar (diploma) maka mata kuliah dasar umum (MKDU) perlu diberikan. Mata kuliah yang termasuk MKDU ialah : Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan kewiraan, Bahasa Indonesia, Agama, IBD, dan ISD/IAD.

d. SKS

Mata kuliah untuk PJJ koperasi perlu diberikan bobot SKS. Untuk ini SKS berkisar antara 1 - 4 SKS, namun lazimnya SKS yang diberikan ialah antara 2 dan 3 SKS. Pemberian bobot SKS ini tergantung pada keinginan kita untuk memberikan beban materi kuliah dalam kurun waktu tertentu dan biasanya dalam satu semester.

e. GBPP (Garis Besar Program Pengajaran)

GBPP ialah rumusan tujuan, pokok-pokok isi mata kuliah yang meliputi komponen seperti berikut :

- 1) Tujuan Instruksional Umum (TIU)
- 2) Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
- 3) Topik atau pokok bahasan
- 4) Estimasi waktu yang diperlukan
- 5) Sumber kepustakaan (Atwi Suparman, 1988, p.4)

Dalam penyusunan GBPP ini harus reachable dan measurable, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dicapai 100%.

f. Seminar kurikulum

Kurikulum dan GBPP yang sudah disusun perlu diseminarkan (seminar 1 hari) dengan mengundang ahli subjek, ahli kurikulum dan ahli pendidikan.

2. Kegiatan proses belajar mengajar

Kegiatan belajar mengajar yang dimaksud disini ialah dalam proses kegiatan belajar mandiri. Namun perlu diketahui bahwa dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh kegiatan belajar tidak selamanya melalui jarak jauh (at a distance), akan tetapi dapat pula diberikan melalui tatap muka. Tentunya kegiatan tatap muka ini porsi nya tidak melebihi kegiatan mandiri.

Langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan proses belajar mandiri antara lain:

- a. Menunjuk tenaga tutor yang dapat membantu/membimbing mahasiswa dalam memahami materi modul.
- b. Membentuk kelompok belajar di beberapa koperasi yang dipusatkan di Primer KPN.
- c. Tutorial diselenggarakan 1 kali dalam satu jenjang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk membantu mahasiswa, karena mereka yang relatif masih baru mengikuti program PJJ koperasi.

3. Bahan belajar

Modul merupakan bahan utama yang digunakan dalam PJJ koperasi, karena modul memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan oleh berbagai type belajar mahasiswa baik mahasiswa type senang berbicara (talkative), type membaca dan melihat sendiri (visual), senang menyendiri (silent) dan type mendengar (auditive) walaupun type terakhir ini perlu dibantu dengan kaset audio. Untuk menunjang hal tersebut, modul harus disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan sistem insruksional yang sama seperti halnya seorang dosen mengajar dalam kelas tatap muka. Dengan demikian bahasa yang digunakan juga bukan bahasa text book. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam penulisan modul, jumlah halaman dapat dijadikan pedoman bagi besar kecilnya jumlah SKS, seperti berikut:

- untuk mata kuliah yang berbobot 1 SKS sebagai pedoman harus berjumlah kira-kita antara 120-130 halaman.
- untuk 2 SKS berjumlah 240-300 halaman
- untuk 3 SKS berjumlah 360-400 halaman
- untuk 4 SKS berjumlah 400-500 halaman

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan modul antara lain:

a. Menunjuk calon penulis modul

Calon penulis yang akan dilibatkan dalam penulisan modul, sebaiknya pakar dalam bidangnya masing-masing. Salah satu hal yang penting ialah mereka sudah terbiasa dalam menulis materi.

b. Untuk penulis modul dapat dilibatkan dosen dari perguruan tinggi atau para pakar yang ada di instansi pemerintah.

c. Penulisan modul memerlukan waktu kira-kira 1 tahun, oleh karena itu harus dipersiapkan jauh sebelum waktu itu.

d. Para penulis modul perlu diberikan latihan teknis penulisan modul. Setelah itu mereka akan menulis modul secara individual. Selama itu pula perlu dilakukan pengecekan secara terus menerus

untuk mengetahui kemajuan penulisan modul.

- e. Sebaiknya penulis modul hanya menulis 1 modul saja, ini untuk menghindari jangan sampai tidak selesai.
- f. Bagi modul yang materinya sekuensial sebaiknya ditulis oleh tim, untuk menghindari tumpang tindih materi atau materi tidak tercantum sama sekali.
- g. Review modul perlu dilakukan untuk mengecek readability, baik dari segi bahasa, materi maupun metode mengajarnya.

3. Evaluasi belajar

Evaluasi belajar merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan dalam keseluruhan sistem PJJ koperasi ini. Evaluasi inilah yang akan memberikan ukuran keberhasilan belajar. Oleh karena itu perlu ditetapkan beberapa ketentuan evaluasi ialah:

- a. Evaluasi belajar akan dilakukan pada akhir jenjang pendidikan, misalnya pada akhir setiap 3 bulan.
- b. Para peserta didik yang tidak lulus pada ujian akhir perlu diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang selama 2 kali. Apabila mereka tidak lulus dalam ujian ulang ini, mereka hanya memperoleh sertifikat dan tidak boleh melanjutkan kepada jenjang selanjutnya (lihat sistem penjenjangan).

4. Sarana belajar

Sejauh mungkin perlu disediakan sarana belajar penunjang yang dapat membantu mahasiswa dalam belajar, antara lain perpustakaan, forum diskusi mahasiswa, kelompok belajar dan sebagainya. Oleh karena PJJ koperasi ini merupakan salah satu program studi di FEKON, maka sarana belajar yang ada dapat ditambah dan ditingkatkan penggunaannya.

B. Organisasi

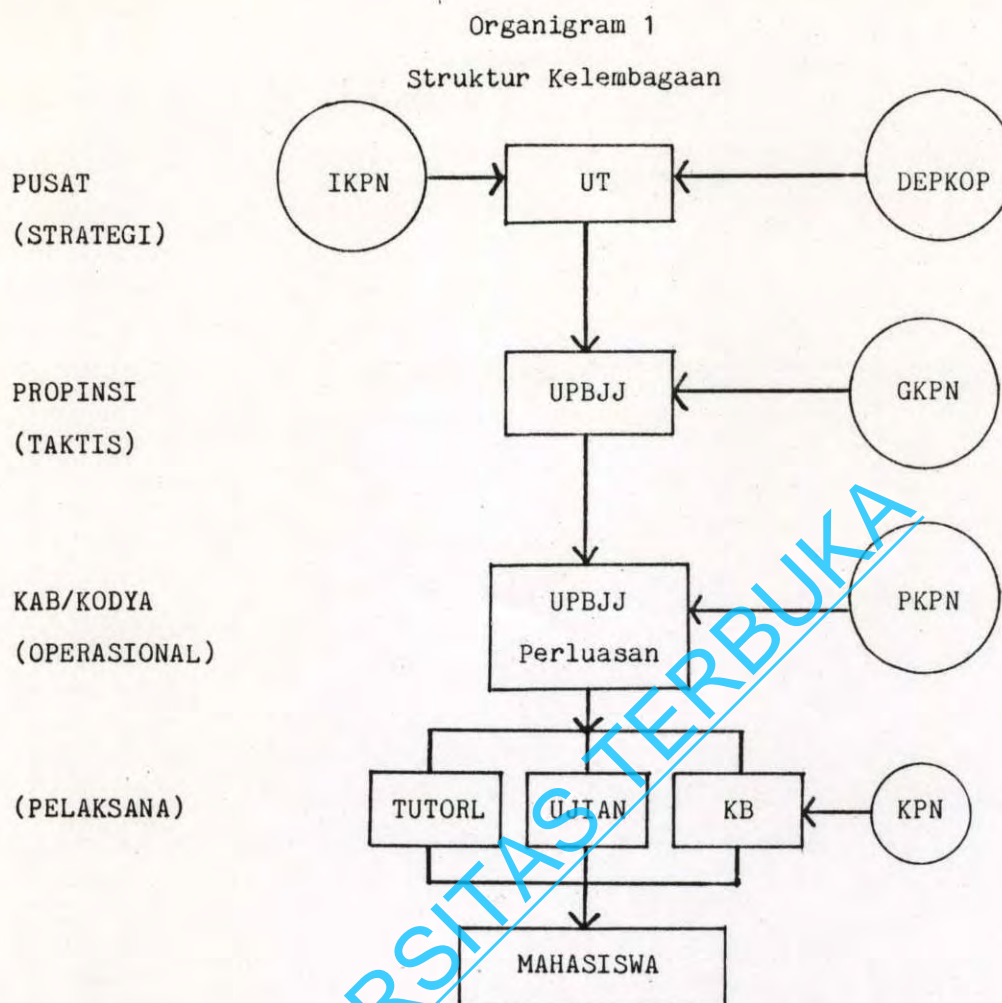
Untuk mengembangkan PJJ koperasi perlu ditunjang oleh organisasi yang kuat, artinya melibatkan unit dan institusi terkait ke dalam sistem.

Organisasi seperti ini sangat penting untuk:

1. Memberikan garis kerja yang tegas antara unit terkait dalam mempersiapkan dan mengelola PJJ koperasi.
2. Memberikan otonomi kepada komponen unit organisasi untuk melakukan kegiatan kerjanya.
3. Menjalinkan kerja sama antar unit terkait dalam mengelola PJJ koperasi.
4. Memberikan sumbangan baik materil/spirituil sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan PJJ koperasi.

Dalam penyelenggaraan PJJ koperasi ini perlu kerja sama antara UT dengan IKPN-RI sesuai dengan kemampuannya masing-masing. UT akan mengelola masalah yang bersifat akademis, administrasi akademis beserta sistem penunjangnya, sedangkan IKPN-RI menangani masalah yang berkaitan dengan ketatausahaan dan keuangan (non-akademis).

Organisasi ini pada dasarnya dapat dijadikan dua struktur organisasi yaitu struktur organisasi kelembagaan dan struktur organisasi fungsi. Kedua struktur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi dapat memperjelas tugas dari organisasi. Berikut ini dijelaskan struktur organisasi yang diusulkan baik menurut kelembagaan maupun struktur organisasi menurut fungsi.



Berdasarkan organigram tersebut menunjukkan adanya struktur kelembagaan dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kodya. UT dibantu IKPN/Depkop sebagai pengelola di tingkat pusat bekerja sama dalam hal mengatur pengelolaan dan pelaksanaan program. Sedangkan UPBJJ sebagai pengelola di tingkat propinsi berperan sebagai pengelola ditingkat daerah yang melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh tingkat pusat, dibantu oleh GKPN. Disamping itu, UPBJJ perluasan dapat menjadi kordinator di beberapa wilayah tertentu sebagai pelaksana kegiatan yang dibantu oleh PKPN dan Primer KPN. Kemungkinan UPBJJ perluasan ini dapat ditambah atau dikembangkan lagi di beberapa daerah. Dalam hal ini, tingkat pusat dalam menggariskan kebijakannya perlu didasarkan dan

memperhatikan kondisi di daerah.

Peranan pengelola tersebut dapat diuraikan menurut tingkatnya seperti berikut:

1. UT bersama IKPN :

- a. Menyusun peraturan dan kebijakan pengelolaan sistem PJJ,
- b. Mengelola administrasi umum pengelolaan PJJ terutama yang berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan komunikasi.
- c. Mengangkat tenaga pengelola yang ada ditingkat propinsi dan kabupaten/kodya berdasarkan masukan dari tingkat daerah.
- d. Meminta laporan kegiatan pelaksanaan PJJ di daerah.
- e. Memberikan pengarahan tentang hal yang berkaitan dengan program PJJ, melalui pengarahan, dan RAKOR.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PJJ.
- g. Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam mendukung PJJ.
- h. Mengeluarkan kartu identitas.

2. UPBJJ dibantu GKPN :

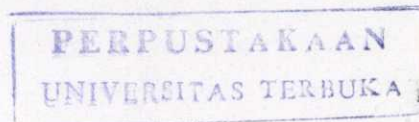
- a. Melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh tingkat pusat.
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum di tingkat propinsi yang berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan komunikasi.
- c. Memberikan laporan umum pelaksanaan program beserta masukan tentang kegiatan PJJ koperasi di daerahnya.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PJJ koperasi di tingkat kabupaten.
- e. Meminta laporan kegiatan dari tingkat kotamadya/kabupaten

3. PKPN dan Primer KPN

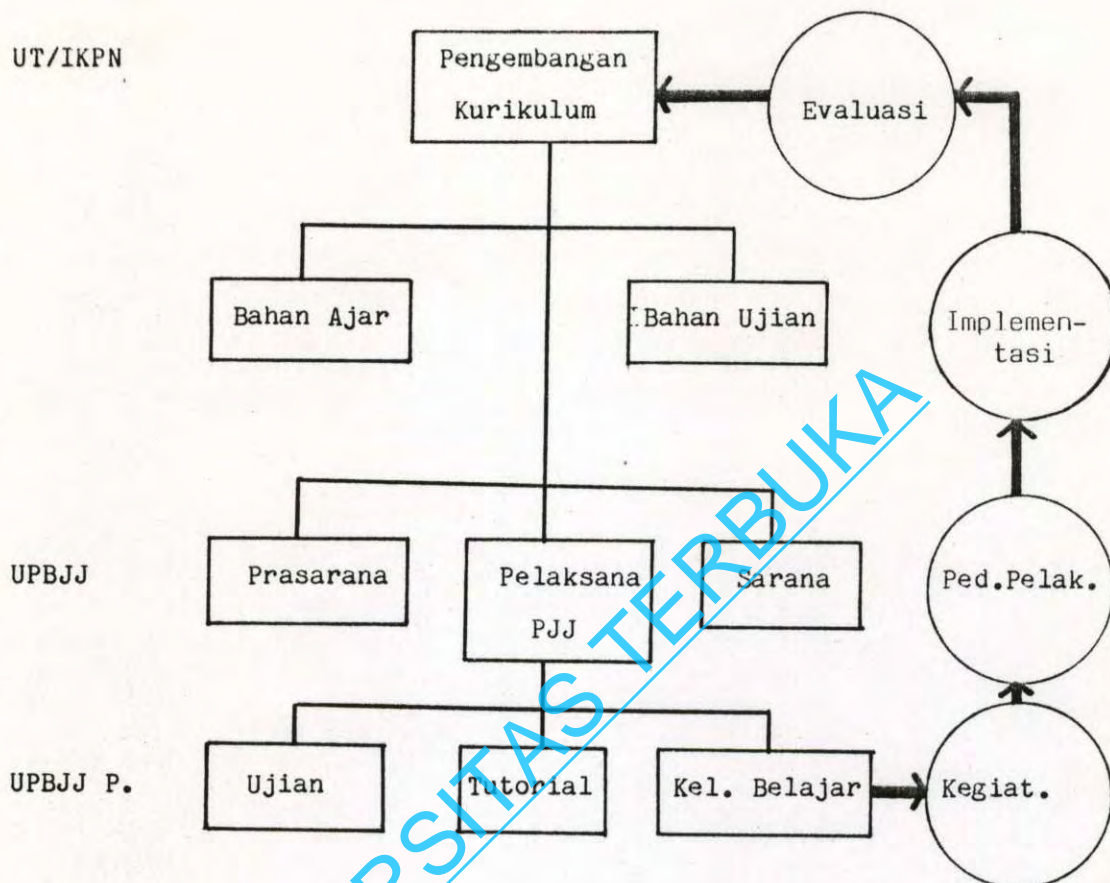
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- b. Melaksanakan kegiatan Program Pendidikan Jarak Jauh yang meliputi pendaftaran mahasiswa, tutorial, ujian dan mengelola kelompok belajar.
- c. Melakukan pencatatan terhadap semua dokumen belajar mahasiswa.
- d. Memberikan laporan dan masukan kepada pengelola propinsi dan pusat.

Disamping organisasi kelembagaan seperti diuraikan di atas, berikut ini adalah jalinan fungsi organisasi, yang pada dasarnya mengikuti struktur kelembagaan.

UNIVERSITAS TERBUKA



Organigram 2:
Fungsi Kelembagaan



Berdasarkan organigram tersebut, peranan pengelola dapat diuraikan seperti berikut:

1. UT/IKPN

- a. Menyusun kurikulum dan Garis Besar Program Pengajaran
- b. Menetapkan Jenjang program PJJ yang akan ditawarkan, apakah program sertifikat, program diploma atau S1.
- c. Mengembangkan bahan ajar dan bahan ujian sesuai dengan penjenjangan studi.
- d. Menetapkan kriteria dan prasyarat mahasiswa yang masuk PJJ koperasi
- e. Menyusun buku pedoman Program Pendidikan Jarak Jauh/katalog yang berisi tentang pedoman umum dan teknis penyelenggaraan PJJ

- f. Menetapkan persyaratan tutor, dan pengawas ujian.
- g. Menyusun jadwal kegiatan akademik.
- h. Menerima pendaftaran mahasiswa.
- i. Sertifikasi

2. UPBJJ

- a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran mahasiswa
- b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan tutorial
- c. Mengatur dan melaksanakan ujian
- d. Mengatur dan melaksanakan kegiatan belajar
- e. Memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa.
- f. Memberikan pelayanan administrasi.
- g. Memanage Kelompok Belajar

3. UPBJJ Perluasan

Dibantu oleh PKPN dan Primer KPN, UPBJJ perluasan memberikan pelayanan langsung kepada mahasiswa tentang:

- a. Akademik
 - penyampaian bahan belajar/ujian
 - pelayanan pada kegiatan tutorial
 - pelayanan pada kegiatan kelompok belajar
- b. Non-akademik
 - Pelayanan pendaftaran ujian/ujian ulang
 - Pelayanan kartu mahasiswa
 - Pelayanan administrasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata UT perlu lebih meningkatkan dan mengembangkan UPBJJ perluasan, agar memperoleh peran yang lebih besar dalam pelaksanaan PJJ koperasi.

Untuk memperjelas kaitan antara struktur kelembagaan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik dapat dilihat dalam matriks 1(terlampir).

C. Kompetensi

Untuk mengembangkan kurikulum PJJ koperasi yang "baik", yaitu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi, perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

1. Menghimpun semua tasks dan jobs yang dilaksanakan di koperasi.
2. Memprioritaskan tasks dan jobs yang penting dan saat ini belum banyak dikuasai oleh pengelola dan anggota koperasi.
3. Mengelompokkan tasks dan jobs mejadi beberapa kelompok, dan kelompok ini merupakan dasar bagi pengembangan mata kuliah.
4. Pengembangan kurikulum didasarkan pada mata kuliah atau kelompok task yang dikembangkan pada butir 3.

Walaupun kurikulum PJJ koperasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan praktis dalam kerja sehari-hari, namun tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat ideal. Charters (Saylor, et al, 1983, p.218) mengemukakan hal tersebut karena "activities are not carried on without ideals to govern, and ideals will not operate except through activities".

Dari data yang berhasil dikumpulkan ternyata bahwa sebagian besar pengelola dan anggota koperasi (lebih dari 95%) menganggap penting dikuasainya pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) berikut ini. Namun dari kompetensi tersebut sebagian sudah mereka kuasai dan sebagian lagi belum. Berikut ini adalah kompetensi yang belum banyak dikuasai oleh para pengelola koperasi termasuk anggota.

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
1. Pengurus	
a. Manajemen	
1). Perencanaan kegiatan koperasi	-
2). Teknik pengawasan kegiatan koperasi	-
3). Pola kebijakan dalam pengelolaan	-
4). Manajemen pemasaran	-
5). Teori pengendalian produksi	-
6). Teori pengendalian harga	-
7). Metode pengalokasian dana	-
8). Sistem pengelolaan pegawai	-
9). Penyusunan tingkat pengembangan aktivitas usaha	-
10). Fungsi Tingkatan manajemen	-
b. Administrasi	
1). Cara pengisian buku daftar manajer dan karyawan	-
2). Administrasi perdagangan	-
c. Organisasi	
1). Metode penyusunan struktur organisasi	-
2). Cara penyusunan uraian tugas	-
3). Sistem komunikasi kerja	-
4). Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	-
5). Penyusunan program kerja	-
6). Perencana Anggaran Pendapatan Belanja	-
7). Kandungan materi UU No.12/67	-

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
d. Permodalan	
1). Penggalian sumber modal	-
2). Persyaratan penyusunan anggaran	-
3). Penginvestasian modal	-
4). Perencanaan alokasi biaya	--
5). Penemuan usaha baru	-
6). Penghitungan SHU	-
7). Evaluasi dan analisa modal	-
8). Pembuatan laporan atas modal	-
e. Akuntansi	
1). Penganalisaan laporan keuangan	-
2). Analisa keluar masuk biaya	-
3). Penggunaan akuntansi	-
4). Fungsi bagan siklus akuntansi	-
5). Peran Bukti pembukuan (kwitansi, faktur, resi)	-
6). Kegunaan buku kas harian dan rekapitulasi	-
7). Kegunaan buku kas harian memorial dan rekapitulasi	-
8). Kegunaan buku besar dan pembantu	-
9). Analisa ratio untuk pengukuran kemampuan koperasi	-
10). Cara pemantauan penggunaan biaya	-
11). Peraturan perpajakan	--
12). Pemantauan pajak	--

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
f. Kepemimpinan	
1). Fungsi manajemen	-
2). Kepemimpinan	-
3). Persyaratan pemimpin koperasi	-
4). Perkembangan koperasi	-
g. Teori koperasi	
1). Azas, landasan dan tujuan koperasi	-
2). Peraturan perpajakan koperasi	---
3). Peraturan dan kebijakan	-
h. Pemasaran	
1). Menafsirkan kebutuhan pasar	---
2). Cara promosi	---
3). Persaingan usaha	---
4). Menetapkan harga	---
5). Pengendalian harga	---
i. Pembelanjaan	
1). Teori penentuan besi	---
2). Metode persediaan barang(LIFO,FIFO)	---
3). Teori pemantauan terhadap barang	---
4). Teori menaksir kemampuan modal	---
2. Kepengawas	
a. Organisasi	
1). Menganalisa struktur	-
2). Menganalisa uraian tugas	-

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
3). Memahami AD/ART	-
4). Menafsirkan kebijakan	-
5). Mengevaluasi program kerja	-
6). Menganalisa anggaran	-
7). Menarik kesimpulan pada RAT	-
b. Audit	
1). Memahami norma pemeriksaan	-
2). Landasan audit	-
3). Kemampuan menciptakan instrumen pemeriksaan	-
4). Menganalisa hasil pemeriksaan	--
5). Membuat laporan pemeriksaan	--
6). Membuat laporan keuangan	-
7). Membuat laporan pemeriksaan organisasi usaha	--
8). Menemukan pemecahan masalah dalam perkoperasian	-
c. Teori koperasi	
1). Asas dan teori koperasi	-
2). Undang-undang/peraturan perkoperasian	-
3). Tujuan dan cita-cita koperasi	--

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
3. Karyawan a. Asas dan landasan koperasi 1). Teori dan landaan koperasi 2). Tujuan koperasi 3). Kandungan AD/ART 4). Penjabaran uraian tugas b. Penjualan 1). Penataan barang 2). Membuat bukti penjualan (faktur, resi, kuitansi) 3). Melakukan stok opname 4). Sistem penjualan konsinyasi 5). Menaksir kebutuhan konsumen c. Kasir 1). Pengamanan uang dan pendelegasian brankas 2). Prosedur penyeteroran dan pengambilan uang 3). Penggunaan kartu utang 4). Daftar tagihan d. Pembukuan 1). Pembuatan bukti umum dan buku besar 2). Membuat rekapitulasi uang 3). Membuat jurnal penyesuaian 4). Membuat neraca laporan R/L	-- -- -- - - - - - - - - - - -- -- -- --

ASPEK	PROPORSI PENGUASAAN
dan perubahan modal	--
5). Membuat buku biaya organisasi	--
6). Pembukuan daftar inventaris	-
e. Organisasi dan kearsipan	
1). Penggunaan administrasi kearsipan	-
2). Penggunaan perlengkapan organisasi	-
3). Pengelolaan kebutuhan ATK	-
4). Pengarsipan surat	-
5). Penggunaan buku daftar hadir	-
f. Bagian gudang/barang	
1). Melakukan penataan barang	-
2). Menghitung penyusutan barang	--
3). Pengisian kartu persediaan barang	--
4). Metode perhitungan persediaan barang (LIFO, FIFO, Average)	--
5). Mengetahui jumlah barang dan pembelian	-
6). Membuat rekapitulasi penjualan dan pembelian	-
7). Prosedur permintaan barang	-
8). Menilai kualitas barang	-
9). Membuat laporan pengadaan dan persediaan barang	--
10). Menggunakan daftar penagihan	-

ASPEK	PROPORSI PENGUJIAN
g. Daftar penagihan	
1). Pengelolaan keadaan buku simpanan hutang/piutang	-
2). Pengukuran saldo dengan bagian pembukuan	--
3). Penggunaan data penagihan	--
h. Bagian pembelian	
1). Penggunaan faktur yang sah	-
2). Membukukan barang yang dibeli	-
3). Rekapitulasi laporan pembelian	-
i. Pramuniaga	
1). Penataan letak barang	-
2). Pengetahuan tentang harga	-
3). Melakukan stock opname	-
j. Pemasaran	
1). Mengidentifikasi unsur pemasaran dan analisa pasar	---
2). Identifikasi informasi yang diperlukan	---
3). Metode pembungkusan barang	---
4). Memilih saluran distribusi	--
5). Kalkulasi biaya penentuan harga	--
6). Penyusunan program pemasaran	--

Keterangan :

- = Kompetensi yang belum dikuasai oleh 10%-20% pengelola
- = Kompetensi yang belum dikuasai oleh 30%-50% pengelola
- = Kompetensi yang belum dikuasai oleh > 50% pengelola

Disamping kompetensi tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum PJJ koperasi ini karena pada umumnya pengelola koperasi mempunyai "kesulitan" dalam hal berikut:

a. Dalam aspek kemampuan pegawai

- Pengetahuan dan dasar perkoperasian kurang dikuasai oleh pengelola sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk menerapkan kebijakan yang digariskan.
- Keterampilan praktis
- Keterampilan pengelolaan dokumen dan data masih rendah
- Sulit mengatur waktu karena kesibukan

b. Peningkatan usaha

- Sulit memperoleh modal
- Sulit menguasai pasar
- Sulit menemukan bidang usaha
- Sulit mengimbangi perkembangan harga pasar
- Anggaran koperasi rendah

c. Menggali sumber dana

- Tidak ada sponsor atau donatur
- Kurang kesadaran dan kemampuan penabung dari anggota

d. Menerapkan kebijakan

- Peraturan koperasi yang sangat beragam
- Kesulitan menanamkan disiplin
- Kesadaran berkoperasi rendah

e. Komunikasi antar koperasi

- Kerja sama antar koperasi kurang
- Kurang harmonis hubungan antara Primer KPN dengan instansi setempat

f. Perluasan anggota

- Kurang petugas penyuluh koperasi
- Kesulitan dalam pembukuan/akuntansi
- Kurang petunjuk dari DEPKOP

Berdasarkan kesulitan ini dapat diangkat menjadi faktor yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum, karena pada dasarnya kurikulum akan menampung kemampuan yang belum dikuasai tetapi sangat dibutuhkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Implementasi

1. Tahap pelaksanaan

PJJ koperasi diselenggarakan terutama untuk meningkatkan kualitas tenaga pengelola dan anggota koperasi Primer KPN di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya diusulkan secara bertahap. Tahapan tersebut dapat dibagi kedalam beberapa katagori, yaitu tahapan menurut wilayah dan tahapan menurut peserta didik.

a. Tahapan menurut wilayah

Implementasi dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pada tahap-tahap awal diusulkan di Jawa saja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan pada tahap awal kegiatan karena komunikasi di Jawa relatif lebih lancar. Apabila program dan sistemnya sudah terlaksana dengan baik dan mantap, maka pada tahap berikutnya akan diperluas ke seluruh Indonesia.

b. Tahap menurut peserta didik

Tahapan pertama akan diprioritaskan kepada karyawan dan pengurus koperasi, sebagian besar dari karyawan terutama di luar Jawa belum mengikuti penataran perkoperasian. Apabila karyawan gelombang pertama sudah selesai mengikuti program PJJ koperasi maka akan diperluas pada anggota. Namun demikian bagi anggota yang berminat mengikuti program ini, secara individual dapat mengikuti program sejak tahap awal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan pada tahap awal, dimana pada tahap ini masih dalam rangka mencari bentuk dan model PJJ koperasi yang paling sesuai.

2. Jenjang studi

Sesuai dengan keahlian yang dituntut setelah mereka menyelesaikan studinya, maka jenjang studi PJJ koperasi ini diusulkan menjadi 3 jenjang, yaitu:

- a. Jenjang pemula, yaitu keahlian pada tingkat pertama yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap pengelola dan juga anggota koperasi. Penyelenggaraan jenjang ini bertujuan untuk menghasilkan para pelaksana koperasi yang ahli dalam melaksanakan pengelolaan, menjalankan usaha koperasi, membuat laporan keuangan, laporan tahunan dan sebagainya.

Beberapa ketentuan dalam jenjang pemula ialah:

- 1). Pada tingkat pemula ini akan diarahkan pada penguasaan landasan teori dan azas-azas koperasi secara lebih umum. Jenjang ini akan diberikan pada pengelola dan anggota koperasi yang belum pernah sama sekali mengikuti penataran atau pendidikan koperasi.
- 2). Lama pendidikan yang dapat ditempuh dalam jenjang ini ialah 3 bulan belajar.
- 3). Jumlah SKS yang disediakan untuk jenjang ini ialah antara 10-15 SKS.
- 4). Bagi peserta yang sudah menyelesaikan jenjang ini berhak memperoleh sertifikat.

- b. Jenjang penata, yaitu keahlian yang diberikan pada pengelola atau anggota koperasi yang sudah mengikuti jenjang pemula, atau mereka yang sudah pernah mengikuti penataran sebelumnya. Jadi jenjang ini merupakan jenjang lanjutan dari jenjang pemula atau penataran lainnya. Untuk ini akan dilakukan penilaian kredit dalam rangka alih kredit.

Jenjang penata dimaksudkan untuk memberikan keahlian pada peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang ini. Dari mereka diharapkan bukan saja dapat melaksanakan pengelolaan dan kegiatan koperasi tapi dituntut untuk dapat melaksanakannya secara tertib, dengan kemampuan penataan tertib administrasi, dan tertib kerja. Dari mereka dituntut untuk mampu melakukan pengawasan dalam rangka penataan dan menegakan "tertib" tadi.

Ketentuan yang termasuk pada jenjang ini ialah:

- 1) Bahan yang diajarkan merupakan kelanjutan dari jenjang pemula dengan memasukan unsur praktek sehingga perbandingan antara teori dan praktek mejadi 70 : 30,
- 2) Lama pendidikan yang ditempuh ialah 3 bulan belajar,
- 3) Jumlah SKS yang diberikan selama jenjang ini ialah 10-20 SKS,
- 4) Bagi mereka yang sudah menamatkan pendidikan jenjang ini akan diberikan sertifikat.

c. Jenjang penggerak, yaitu keahlian yang diberikan pada peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang ketiga ini. Jenjang ini merupakan lanjutan dari jenjang penata dan tidak menerima dari jenis penataran lainnya. Jenjang ini memberikan kemampuan yang bukan saja sebagai pelaksana, penata koperasi tetapi juga mampu menjadi penggerak koperasi. Dalam jenjang ini mereka dituntut mampu mengembangkan perkoperasian, baik sistem pengelolaan, sistem usaha, permodalan, pemasaran dan juga konsep dan idealisme koperasi. Ketentuan yang termasuk pada jenjang ini ialah:

- 1) Waktu studi ialah selama 3 bulan,
- 2) Untuk jenjang ini diberikan angka kredit 10-20 SKS,
- 3) Materi yang diberikan untuk jenjang ini sebagian besar ialah praktek lapangan atau pengkajian materi praktek lapangan, dengan perbandingan teori dan praktek sebesar 50:50.
- 4) Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan ini akan diberikan ijazah setingkat diploma 1.

Tiga jenjang pendidikan keahlian dalam bidang koperasi ini dapat ditempuh secara bertahap yaitu tahap demi tahap dengan tenggang waktu 1-2 tahun, dari mulai jenjang pemula, terampil sampai pada jenjang mahir. Atau sekali gus dari tingkat pemula sampai tingkat mahir, sehingga seorang peserta didik yang sudah menyelesaikan studi pada PJJ koperasi secara tuntas dapat memperoleh keahlian "mahir koperasi" dengan ijazah setingkat diploma 1. Dengan demikian maka program PJJ

koperasi ini diberikan pada mereka yang berijazah minimal SMA. Sedangkan bagi mereka yang berijazah dibawah SMA hanya diperbolehkan mengikuti jenjang pemula saja dengan modifikasi materi tanpa dapat mengikuti jenjang selanjutnya. Hal ini perlu diatur secara tersendiri.

Penjenjangan menjadi 3 jenjang pendidikan ini dimaksudkan untuk :

- 1) memberi kesempatan kepada pengelola koperasi yang belum pernah mengikuti pendidikan perkoperasian sama sekali untuk mengikuti pendidikan dari tingkat awal.
- 2) Memberikan keringanan biaya, karena dengan cara penjenjangan biaya yang dikeluarkan dapat diangsur sesuai jenjang yang ditempuh.
- 3) Memenuhi kebutuhan akan kebutuhan pendidikan koperasi setingkat diploma 1, karena dengan melalui ijazah diploma diharapkan taraf hidup mereka dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut maka program pendidikan bagi pengelola dan anggota koperasi dapat diusulkan dengan alternatif lain yaitu:

- 1) Program pendidikan bagi pengelola koperasi yang dilaksanakan ini merupakan program sertifikat dan atau program diploma. Program ini akan merupakan program studi baru di UT yang dikelola oleh FEKON dan diberi nama "manajemen koperasi".
- 2) Program ini dapat pula dilaksanakan sebagai penataran biasa, sehingga merupakan penataran "manajemen koperasi", yang dapat ditempuh secara terpisah untuk setiap jenjangnya. Penjenjangan ini tidak merupakan jenjang berkelanjutan, sehingga setiap jenjang yang diselesaikan mendapat sertifikat.

3. Mekanisme kegiatan

Untuk menyelenggarakan PJJ koperasi, perlu dirumuskan mekanisme kegiatan yang baku. Hal ini harus dituangkan dalam pedoman penyelenggaraan akademik secara jelas.

a. Pendaftaran

Untuk tertibnya penyelenggaraan program PJJ koperasi, maka pendaftaran mahasiswa harus diatur sedemikian rupa, sehingga yang masuk menjadi mahasiswa adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat. Oleh karena pendaftaran disertakan dengan mahasiswa UT, maka dalam pelaksanaannya tidak akan terlalu sulit. Namun demikian perlu tenaga dari IKPN atau GKPN untuk membantu pelaksanaannya.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain seperti berikut:

- 1) Masa pendaftaran ditentukan sesuai dengan masa pendaftaran di UT.
- 2) Tempat pembelian formulir pendaftaran di Kantor Pos Tempat Penjualan Formulir (KPPF) yang ada di setiap kota.
- 3) Harga formulir pendaftaran ditetapkan sama dengan harga formulir mahasiswa UT.
- 4) Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui GKPN, dan GKPN akan mendaftarkan ke kantor pos. Berkas pendaftaran dikirim ke UPBJJ.
- 5) Calon yang memenuhi persyaratan dan "seleksi" akan diberikan kartu tanda pengenal.
- 6) Calon yang mendaftar perlu disertai dengan surat keterangan dari PKPN setempat yang menerangkan bahwa pendaftar ialah karyawan Primer KPN setempat dan sudah bekerja minimal 1 tahun.

b. Bahan belajar

Bahan belajar dapat diberikan setelah ada ketentuan calon yang diterima, untuk ini akan diumumkan ke setiap UPBJJ dan GKPN/PKPN.

- 1) Bahan belajar dikirim melalui pos ke GKPN untuk diteruskan ke PKPN dan Primer KPN.

- 2) Bahan belajar yang dikirim merupakan paket belajar untuk jenjang pendidikan tertentu, untuk kurun waktu 3 bulan.
- 3) Bahan belajar yang diberikan terdiri dari materi kuliah dan pedoman kegiatan akademik.

c. Tutorial

Untuk membantu dan membimbing mahasiswa selama belajar, akan dilaksanakan tutorial dengan ketentuan :

- 1) Tutorial dilaksanakan 1 kali dalam satu jenjang pendidikan, yaitu pada akhir bulan kedua.
- 2) Tutorial dilakukan oleh tutor yang diangkat secara resmi.
- 3) Tutorial ekstra dapat dilaksanakan pada kelompok-kelompok belajar, dan kelompok belajar dapat terdiri dari peserta dari 1 atau lebih Primer KPN.

d. Ujian

Beberapa ketentuan yang dapat dilaksanakan dalam ujian, antara lain :

- 1) Ujian dilaksanakan pada bulan terakhir, setelah mahasiswa menyelesaikan studinya selama 3 bulan untuk setiap jenjang pendidikan, sesuai dengan program yang dijadwalkan UT.
- 2) Tempat penyelenggaraan ujian ialah di PKPN setempat.
- 3) Ujian dilakukan secara serempak diseluruh PKPN.
- 4) Pengawasan ujian dilakukan oleh orang yang telah ditetapkan dalam peraturan dan pedoman.
- 5) Pemrosesan hasil ujian akan dilakukan di UT Jakarta.
- 6) Hasil ujian diumumkan 1 bulan setelah ujian dilaksanakan.

E. Proyek Perintisan

Pada Bab I bagian C telah disinggung mengenai perlunya proyek perintisan (pilot project) dalam pengembangan program Pendidikan Jarak Jauh bagi para pengelola dan anggota Koperasi Pegawai negeri.

Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting, sebelum program ini diimplementasikan secara meluas. Proyek Perintisan ini merupakan langkah pengujian dan evaluasi baik terhadap sistem secara integral maupun terhadap komponen demi komponen, untuk diketahui kekuatan dan kelemahannya.

Evaluasi dilaksanakan secara terus menerus, dengan melalui pengamatan yang cermat terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya proyek perintisan dilakukan untuk melihat keterpaduan semua komponen dalam pelaksanaannya. Beberapa ketentuan untuk proyek perintisan ialah seperti berikut :

1. Dipilih salah satu daerah kabupaten/propinsi sebagai daerah perintisan.
2. Daerah perintisan diusahakan tidak memiliki keunikan tersendiri, dan secara geografis transfortasinya mudah, komunikasi ke daerah lancar baik melalui telpo maupun pos, dan secara potensial daerah tersebut mempunyai ahli perkoperasian dan diharapkan dapat membantu pengimplementasian PJJ koperasi. Jawa Barat merupakan daerah yang tepat untuk daerah perintisan dan akan dipusatkan di kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Garut sebagai pilot projet.
3. Pelaksana pengelolaan program perintisan ini ialah mereka yang ditunjuk dan akan melaksanakannya nanti setelah diimplementasikan secara luas.
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terus menerus selama proyek perintisan dilaksanakan, sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaksnakan.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam proyek perintisan :

1. Memilih satu kabupaten sebagai daerah sampel perintisan.
2. Menetapkan pengelola bagi pelaksanaan program di daerah perintisan.

3. Penataran bagi pengelola perintisan, dan materi penataran menitik beratkan pada hal berikut :

- a) Pengenalan sistem PJJ koperasi
- b) Pelaksanaan program yang meliputi :
 - pengelolaan administrasi
 - pengelolaan keuangan
 - pengelolaan akademik
 - pengelolaan kesiswaan
- c) Pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - pendaftaran
 - tutorial
 - ujian
- d) Pelaksanaan program :
 - pendaftaran mahasiswa
 - distribusi bahan
 - pelaksanaan belajar mandiri
 - tutorial
 - kelompok belajar
 - ujian
- e) Evaluasi dan pemantauan
- f) Penataan dan penyempurnaan sistem.

Dalam pelaksanaan proyek perintisan ini perlu kerjasama secara khusus antara IKPN, UT (FEKON), PUSLITABMAS-UT, Depkop dan koperasi. Evaluasi perlu ditekankan secara khusus terhadap implementasi dan kerjasama pengelolaan.

F. Pembiayaan

Dalam menyelenggaraan progam pendidikan bagi pengelola dan anggota koperasi perlu direncanakan pembiayaan yang mantap. Penyusunan anggaran ini dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Perkiraan anggaran yang akan dikeluarkan/anggaran belanja dalam penyelenggaraan,
2. Sumber yang dapat digali untuk membiayai pelaksanaan program,
3. Faktor biaya lain yang tidak dapat diantisipasi terutama yang berkaitan dengan biaya non-moneter,
4. Faktor inflasi per tahun,
5. Perkembangan persentase perpajakan,

Sehubungan dengan itu maka perkiraan anggaran yang perlu untuk penyelenggaraan pogram Pendidikan Jarak Jauh koperasi dapat dirinci seperti berikut. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman UT dalam menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh. Pada umumnya dasar perkiraan harga ini sudah baku terutama untuk bahan belajar, soal ujian, dan pengelolaan.

Matriks No. 2

PERENCAAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
BAGI PARA PENGELOLA DAN ANGGOTA KOPERASI

ASPEK KEGIATAN	JML TENAGA	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
A. Pengembangan Sistem				
1. Dokumen				
a. Peraturan	6	3 bl	3 jt	-
b. Kebijakan				
c. Pedoman Pel.	10	5 bl	5 jt	Ped. Um.
d. Ke TU-an				
2. Kurikulum/GBPP				
a. Penyusunan Kur.	30	3 bl	15 jt	Tim kerja
b. Penyusunan GBPP				
c. Penyusunan katalog	5	6 bl	7,5 jt	per 1000
d. Seminar Kur.	35	2 hr	10 jt	sanction
3. Kegiatan belajar				
a. Angkat tutor	810	-	25 jt	27 UPBJJ
b. Tatar tutor	837	1hr	25 jt	27 UPBJJ
c. Pengelolaan tutorial	135	-	135 jt	27 UPBJJ
d. Pengelolaan ujian	-	-	120 jt	27 UPBJJ
4. Bahan Belajar				
a. Penataran penulis	33	2hr	3 jt	-
b. Penulisan bahan ajar	30	1th	135 jt	60 SKS
c. Penulisan soal	30	6bl	47 jt	60 SKS
d. Pencetakan bahan ajar	30	3bl	15 jt	15000 l
e. Pencetakan b.ujian	30	3bl	8 jt	1600 lb
d. Penggandaan bahan ajar	-	6bl	35 jt	per 1000
5. Sarana belajar				
a. Kaset audio	-	6bl	7500rb	per kaset
a. Kaset video	-	-	-	-
B. Organisasi				
1. Penunjukan pengelola daerah	108	-	10.8jt	4/UPBJJ
2. Pengembangan staf DN/LN	2	2th	72jt	konsulta
3. Rakor	52	4hr	5.2jt	per th
4. Biaya pengelolaan	-	1th	540jt	per th

ASPEK KEGIATAN	JML TENAGA	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
C. Keuangan				
1. Penyusunan anggaran rutin	-	-	-	-
2. Penyusunan anggaran taktis	-	-	-	-
3. Pembukuan	-	-	-	-
4. Penggalan sumber	-	-	-	-
D. Perlengkapan/alat				
1. Pusat	-	-	-	-
2. Daerah	-	-	-	-
3. Penyimpanan	-	-	-	-
4. Pemeliharaan	-	-	-	-
E. Pelayanan mahasiswa				
1. Formulir registrasi	-	-	3jt	1500 lb
2. Seleksi formulir	2	-	-	-
3. Penyebaran informasi	4	-	1 jt	2000 lb
4. Pengiriman bahan	-	-	15 jt	30 000 kg
5. Komunikasi	-	-	52 jt	27 UPBJJ
F. Implementasi				
1. Penyebaran info	-	-	-	-
2. Pengenalan program	-	-	-	-
3. Pendaftaran	-	-	-	-
4. Pelaksanaan	-	-	-	-
5. Sertifikat	-	-	1 jt	-
6. Pengiriman bahan	-	-	-	-
7. Tutoria	-	-	-	-
8. Ujian	-	-	-	-
H. Bantuan Teknis dalam dan luar negeri	-	-	-	-
I. Fasilitas fisik	-	-	-	-
K. Pengembangan dan pemeliharaan	-	-	-	-

ASPEK KEGIATAN	JML TENAGA	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1. Proyek Perintisan	20	1 th	70 jt	
1. Monotoring	-	-	-	-
2. Pengelolaan	-	-	-	-
3. Penataran	-	-	-	-
4. Penataan sistem	-	-	-	-
m. Evaluasi	10	1 th	40 jt	3 kab.
1. Pengumpulan data				
2. Evaluasi modul				
3. Pe;aporan				
J U M L A H	:		1.398.575.000,00	

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa uraian dan temuan yang sangat penting dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Program Pendidikan Jarak Jauh bagi pengelola dan anggota koperasi (PJJ koperasi) merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu sistem yang dikembangkan untuk PJJ koperasi ini juga berdasarkan pada sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan melalui berbagai kebijakan dan kurikulum.
2. Potensi daerah sebagai faktor pendukung yang sangat menentukan bagi penyelenggaraan program PJJ koperasi, cukup memadai dalam arti secara geografis cukup menunjang karena koperasi terletak pada tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum, dan komunikasi baik melalui telepon maupun pos dengan daerah juga cukup mudah.
3. Sumber daya manusia sebagai potensi lainnya yang dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan PJJ koperasi ini tersedia cukup banyak terutama di Primer KPN, PKPN dan di Balatkop. Pada umumnya pengurus koperasi ialah para pejabat atau mantan pejabat di daerah yang cukup potensial, dan berpendidikan paling rendah sarjana muda. Setiap koperasi minimal 2 orang bersedia membantu penyelenggaraan PJJ koperasi, sedangkan di Balatkop banyak tersedia para pakar yang sudah biasa melatih atau menatar koperasi dan bersedia membantu.
4. Sumber biaya di daerah yang dapat digunakan untuk membiayai peserta mengikuti program PJJ koperasi sangat terbatas sekali. Biaya yang dapat diandalkan ialah dari dana pendidikan yang ada pada anggaran koperasi. Dan tidak mungkin membiayai pendidikannya dari biaya pribadi karena pendapatan mereka relatif rendah.

5. Prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PJJ koperasi ini cukup tersedia walaupun tidak mencukupi kebutuhan sepenuhnya. Prasarana yang sudah tersedia ialah ruangan rapat yang dimiliki oleh setiap koperasi dapat dimanfaatkan bagi kegiatan belajar termasuk tutorial dan ujian. Tambahan pula beberapa instansi dimana koperasi itu berada juga bersedia untuk membantu dengan berbagai sarana lainnya seperti OHP, komputer dan sebagainya.
6. Motivasi karyawan (internal) untuk mengikuti PJJ koperasi ini cukup tinggi, mereka menghendaki bahwa PJJ koperasi ini tidak hanya sekedar dalam bentuk penataran, tetapi dilaksanakan setingkat diploma 1. Dengan demikian diharapkan apabila mereka telah lulus pendidikan ini dapat meningkatkan karir dan taraf hidupnya. Namun demikian mengandalkan kemauan dan motivasi saja rasanya tidak cukup, mereka perlu mendapat dukungan dari koperasi atau institusinya, misalnya dukungan biaya, dukungan fasilitas dan dukungan kebijakan.
7. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh para pengelola koperasi, ialah yang berkaitan dengan praktek kerja sehari-hari di koperasi. Hal ini sangat penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas mereka. Untuk menunjang praktek ini tetap diperlukan teori dan pengetahuan dasar, oleh karenanya pengaturan proporsi teori dan praktek perlu diprogram secara berimbang.
8. Organisasi dan kerja sama
 - a. Untuk penyelenggaraan PJJ koperasi ini perlu kerja sama yang erat antara IKPN-RI, UT, dan Primer KPN dan instansi terkait lainnya. Hal ini dinilai sangat penting karena masing-masing mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi kelangsungan PJJ koperasi. UT dapat mengelola dan menangani masalah akademis, administrasi akademis bersama sistem penunjang lainnya, sedangkan IKPN-RI menangani masalah ketatausahaan dan masalah keuangan. Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan akan ditangani bersama.

- b. Alat perlengkapan organisasi (UNIT kerja) yang dibentuk diarahkan kepada yang mempunyai peranan langsung dalam penyelenggaraan PJJ koperasi, baik dalam mempersiapkan, melaksanakan pengelolaan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ataupun evaluasi program. Oleh karena itu setiap unsur diisi oleh orang yang tepat menurut peranannya.
9. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PJJ koperasi ialah tidak jelasnya status karyawan dan lemahnya dukungan institusi. Status karyawan menjadi penghambat karena status mereka mengambang, mereka bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta atau BUMN. Akibatnya mereka merasa ragu apakah pendidikan yang mereka tempuh ada manfaatnya bagi karir mereka, misalnya untuk menjadi pegawai negeri, atau untuk naik pangkat dan gaji.

Anggota koperasi adalah pegawai negeri yang sepenuhnya terikat oleh instansinya masing-masing, sehingga keterikatannya oleh koperasi sangat kurang. Hal ini menimbulkan hambatan karena koperasi (Primer KPN, GKPN dan bahkan IKPN) tidak mempunyai "kekuatan" untuk menganjurkan mereka mengikuti PJJ koperasi.

Faktor penghambat lainnya ialah secara institusional mereka tidak ada ikatan dengan jalur kedinasan. Institusi mana yang dapat menganjurkan kepada seluruh karyawan agar dapat mengikuti PJJ koperasi, apakah Primer KPN, PKPN, GKPN, IKPN atau Depkop. Bukti hambatan institusional ini ialah ternyata tidak semua Primer KPN termasuk anggota PKPN atau IKPN. Artinya IKPN tidak mempunyai "kekuatan" untuk mengatur sepenuhnya koperasi pegawai negeri di Indonesia, dan ini pasti menjadi penghambat.

10. Sistem PJJ koperasi yang dikembangkan menekankan pada prinsip andragogi yang mendasari cara belajar mandiri. Dalam hal ini peserta didik dikondisi untuk menjadi proactive learner yang tidak begitu mempedulikan motivasi eksternal, akan tetapi menekankan pada motivasi internal. Oleh karena itu, untuk menunjang sistem ini dikembangkan hal seperti berikut :

- a. Pengembangan sistem PJJ koperasi yang mendukung konsep belajar mandiri dapat dituangkan secara khusus melalui kurikulum, bahan ajar, bahan ujian, kegiatan tutorial dan sarana belajar.
- b. Pengelola menyediakan sistem pelayanan jarak jauh bagi PJJ koperasi, antara lain pendaftaran melalui kantor pos, pengiriman bahan melalui pos, serta penyelenggaraan tutorial dan ujian di unit pelayanan belajar di daerah.
- c. Penjenjangan PJJ koperasi menjadi 3 jenjang pendidikan yaitu jenjang pemula, jenjang penata dan jenjang penggerak. Dalam implementasinya jenjang ini dapat ditempuh perjenjang atau sekaligus untuk 3 jenjang. Hal ini dimungkinkan karena PJJ koperasi diprogramkan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Untuk setiap jenjang yang sudah diselesaikan dapat diberikan sertifikat, apabila sudah menyelesaikan 3 jenjang maka akan diberikan ijazah diploma 1. Oleh karena itu kurikulum yang disusun perlu diselaraskan dengan kurikulum diploma 1 dengan pembobotan SKS seluruhnya antara 40-60 SKS.
- e. Pengembangan bahan ajar dilakukan oleh para pakar koperasi yang ada di koperasi, perguruan tinggi dan di instansi lainnya. Dengan demikian keterpaduan antara praktek dan teori dapat dicerminkan dalam bahan ajar.
- f. PJJ koperasi diselenggarakan dengan memberikan prioritas pada para karyawan dan pengurus terutama yang belum mengikuti penataran. Sedangkan bagi para anggota koperasi, saat ini kurang dirasakan kepentingannya, karena mereka belum banyak terlibat dalam kegiatan koperasi. Memang kesadaran berkoperasi anggota belum begitu menggembirakan, namun itu tidak perlu dilakukan

melalui PJJ koperasi ini.

11. Kompetensi yang dibutuhkan oleh para pengelola dan karyawan koperasi merupakan kebutuhan dasar bagi pengembangan koperasi. Dari keseluruhan kompetensi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kompetensi yang nantinya dapat dituangkan ke dalam kurikulum. Kelompok kompetensi tersebut ialah :

- a. Manajemen
- b. Administrasi
- c. Organisasi
- d. Permodalan
- e. Pembelajaran
- f. Audit
- g. Teori koperasi
- h. Penjualan
- i. Kasir
- J. Pembukuan
- k. Kearsipan
- l. Pergudangan
- m. Pembelian
- n. Pramuniaga
- o. Pemasaran

12. Sebelum PJJ koperasi ini diimplementasikan secara meluas, perlu diuji cobakan melalui pilot project dalam rangka pengujian dan evaluasi dari keseluruhan sistem, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari komponen-komponen yang ada didalamnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara terpadu. Untuk ini ditetapkan beberapa kriteria yang antara lain :

- Secara geografis letak daerah cukup strategis yaitu mudah terjangkau oleh kendaraan umum,
- Komunikasi dengan pusat relatif mudah baik melalui telpon, ataupun melalui pos,

- Daerah pilot project cukup potensial, baik dari segi tenaga yang terlibat, maupun dari prasarana yang tersedia.
- Sesuai dengan persyaratan tersebut maka daerah Jawa Barat merupakan daerah yang memenuhi kriteria tersebut, dan ditentukan 3 kabupaten sebagai kabupaten pilot project yaitu Cianjur, Sukabumi dan Garut.
13. Evaluasi terhadap program PJJ koperasi ini perlu dilakukan untuk memberikan masukan dan informasi tentang:
- a. Penyelenggaraan sistem di lapangan,
 - b. Kekuatan faktor pendukung dan cara menanggulangi faktor penghambat.
 - c. Alternatif pemecahan masalah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat ditarik beberapa saran seperti berikut :

1. Sebaiknya IKPN sudah mulai menjajagi untuk membentuk panitia persiapan PJJ koperasi dengan melibatkan berbagai unsur antara lain IKPN, Koperasi, Depkon dan UT. Disamping itu bentuk kerjasama harus sudah mulai direalisasikan dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan.
2. Mengidentifikasi berbagai faktor pendukung lainnya yang dapat menutupi kekurangan atau kelemahan faktor pendukung yang sudah tersedia, antara lain :
 - a. Mewajibkan semua KPN memiliki pesawat telpon,
 - b. Membuka jalur komunikasi khusus (hot line) antara KPN ke IKPN,
 - c. Menetapkan PKPN sebagai basis pengelolaan PJJ koperasi di daerah.
 - d. Menjalin kerja sama dengan kantor pos.
3. Merencanakan pembiayaan secara mantap bagi penyelenggaraan PJJ koperasi, dengan cara:
 - a. Pemberian beasiswa,
 - b. Pemberian subsidi pada koperasi,
 - c. Membebaskan peserta dari beban biaya misalnya 1 orang tiap KPN.

d. Penggalan dana dari sponsor.

4. Menentukan jenjang pendidikan mana yang akan dipilih dalam langkah pertama penyelenggaraan PJJ koperasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti sudah disebutkan yaitu status karyawan dan dukungan institusi.
5. Mulai mengidentifikasi para pakar yang akan dilibatkan dalam pengelolaan, pengembangan kurikulum dan GBPP, penulisan bahan ajar dan bahan ujian.
6. Pengembangan kurikulum dan GBPP perlu melibatkan berbagai ahli subjek, ahli kurikulum dan pendidikan serta ahli koperasi. Hal ini perlu dipersiapkan minimal 1 tahun menjelang dilaksanakannya PJJ koperasi.
7. Melaksanakan penataran bagi para calon pengelola PJJ, penulis bahan ajar, penulis bahan ujian dan calon tutor. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mengenalkan program dan memantapkan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Pada langkah pertama ini sebaiknya PJJ koperasi diarahkan terhadap karyawan yang berijazah minimal setingkat SMA. Hal ini mempunyai kaitan dengan program yang disajikan yaitu dapat mencapai setingkat diploma 1. Andalkan karyawan yang berijazah dibawah SMA akan disertakan dalam PJJ koperasi ini, maka hanya dapat disertakan pada jenjang pemula dengan mengadakan modifikasi pada materi yang diberikan.
9. Penyelenggaraan pilot project dapat direncanakan sejalan dengan persiapan penyelenggaraan program secara keseluruhan. Pengelola pilot project adalah mereka yang akan menjadi pengelola PJJ koperasi, sehingga pilot project benar-benar merupakan ajang uji coba sehingga pada saatnya implementasi semua komponen program telah teruji.
10. Evaluasi mutlak diperlukan yang kegunaannya bukan saja untuk memonitoring kegiatan dan menyempurnakan program, akan tetapi juga untuk menata pengembangan yang dapat dilakukan sehingga sistem,

model dan pengelolaan PJJ koperasi merupakan pengembangan dasar-dasar keilmuan dan konsep bagi Pendidikan Jarak Jauh.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR BIBLIOGRAFI

- Brookfield, Stephen (1983)., Adult Learner, Adult Education and The Community, Scotland: Open University Press-Milton Keynes.
- Cornelly, Michael F, Albert S. Dukacz, Frank Quinlan (ed.), (1980)., Curriculum Planning For the Classroom, Ontario:
- Holmberg, Borje, (1981)., Status and Trends of Distance Education , New York: Nichols Publishing Company.
- IKPN-RI,(1989)., Rencana Pembangunan Lima Tahun Induk Koperasi Pegawai Negeri Tahun 1989-1993, Jakarta: IKPN.
- Knowles, Malcolm, (1975)., Self Directed Learning, A Guide For Learners and Teachers, Cambridge: New York.
- Saylor, J. Galen, William M. Alexander, Arthur J. Lewis, (1981) Curriculum Planning for Better Teaching and Learning (Fourth Ed), Holt-Soundes International Edition: Japan
- Soltis, Jonas F., (1985)., An Introduction to the Analysis of Educational Concepts (Second Ed.) University Press of America, New York:
- Stufflebeam, Daniel L.,et al.,(1984), Conducting Educational Needs Assessment, AS: Boston Kluwer-Nyhoff.
- Suparman, Atwi,(1988)., Pokok-pokok Panduan Penulisan Modul Universitas Terbuka, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Townsend Coles Edwin K., (1978) Adult Education in Developing Countries, (Second Ed.), Frankfurt: Pergamon Press.

LAMPIRAN I

KAITAN FAKTOR PENDUKUNG DENGAN KEGIATAN AKADEMIK

KEGIATAN PENDUKUNG	KURIKULUM	BAHAN BELAJAR/BU	KEGIATAN AKADEMIK		
			PENDAFTARAN	TUTORIAL	UJIAN
1. Ketenagaan	- ahli kur. - ahli sub. - ahli pend	- penulis modul - penulis soal - ahli desain	- petugas pend - petugas sel	- tutor - instruktur - pembimbing	- pengawas - WASLING - supervisor
2. Administrasi	- pengetikan - penggandaan - pengarsipan -	- pengetikan - perakitan - penggandaan - penataan	- filling - penataan form - arsip	- adminisytrasi - publikasi	- publikasi - administr - dokumentasi - pengolahan
3. Keuangan	- upah - biaya pengg.	- upah - biaya formulir	- upah - biaya adm.	- biaya - biaya pengel. - sewa ruang	- biaya - pengel. - sewa ruang
4. Perlengkapan	- ATK	- ATK - komputer - alat teknologi	- formulir - komputer	- ruangan - ATK	- ruangan - ATK
5. Komunikasi/ Tansfortasi	- dg ahli kur/GBPP	- dg. penulis	- pengumuman pendaftaran,	- penunjukan tutor, instr	- penunjukkan pengawas
6. Kemahasiswaan	- SKS - sertifikasi - transkrip	- tugas mandiri			

LAMPIRAN 2

RENCANA KURIKULUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KOPERASI

Tujuan Kurikuler

Setelah menyelesaikan Program Studi Manajemen Koperasi, peserta diharapkan mampu :

- 1). Melaksanakan kegiatan koperasi sebagai badan usaha; baik dari segi usaha, administrasi, pelayanan dan keuangan,
- 2). Menata koperasi sehingga tercipta koperasi yang memiliki sehat mental, sehat usaha dan sehat organisasi
- 3). Mengembangkan koperasi menjadi badan usaha mandiri, yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

I. PELAKSANA

NO. MATERI	SKS
1. Teori Koperasi	2
2. Manajemen Koperasi	2
3. Manajemen Usaha Koperasi	2
4. Manajemen Simpan Pinjam	2
5. Akuntansi Koperasi	3
6. Praktek Lapangan	3
7. Permodalan Koperasi	2
8. Manajemen Perkantoran	2
9. Pengantar Komputer (elektif)	2
Jumlah	20

II. PENATA

NO. MATERI	SKS
1. Perkoperasian	2
2. Manajemen Keuangan Koperasi	3
3. Budgeting Koperasi	2
4. Perpajakan Koperasi	2
5. Audit Koperasi	2
6. Manajemen Pemasaran	2
7. Fungsi dan Peran Koperasi Pegawai Negeri	2
8. Komunikasi	2
9. Aplikasi Komputer (elektif)	2
Jumlah	20

III. PENGGERAK

NO. MATERI	SKS
1. Konsultasi Manajemen Koperasi	3
2. Ekonomi Moneter dan Perbankan	2
3. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Koperasi	2
4. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	3
5. Manajemen Sumber Daya Manusia	2
6. Kepemimpinan Koperasi	2
7. Studi Kelayakan	2
8. Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi	2
Jumlah	17

MKDU

NO. MATERI	SKS
1. Pendidikan Moral Pancasila	2
2. Bahasa Indonesia	2
3. Pendidikan Kewiraan Nasional	2
4. Ilmu Budaya Dasar	2
5. Ilmu Alamiah Dasar	2
6. A g a m a	2
7. Bahasa Inggris	2
Jumlah	14

UNIVERSITAS TERBUKA